

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kebijakan, Konsep dan Teori

1. Tinjauan Kebijakan

a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diamanatkan bahwa tujuan dari didirikannya Negara Republik Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini memiliki makna bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan kebutuhan setiap warga negara. Dengan menggunakan suatu sistem pemerintahan yang mendukung terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik yang prima, dalam rencana pemenuhan kebutuhan dasar serta hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, serta pelayanan administratif.

Di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 34 ayat (3), menjelaskan negara memiliki tanggung jawab terhadap pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dibuatnya undang-undang ini memiliki tujuan guna pemberian kejelasan hukum, diantara hubungan masyarakat dengan penyelenggara pada pelayanan publik.

Di dalam Undang-Undang ini termuat definisi dari pelayanan publik, yaitu suatu susunan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan, yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk setiap warga negara, penduduk atas barang, jasa ataupun pelayanan administratif. Serta terdapat asas-asas yang termuat pada penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu meliputi Kepentingan Umum, Kepastian Hukum, Kesamaan Hak, Keseimbangan hak dan kewajiban, Keprofesionalan, Partisipatif, Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, Keterbukaan, Akuntabilitas,

Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, Ketepatan waktu, Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam pasal 5 juga termuat mengenai ruang lingkup pelayanan publik, yaitu Pelayanan barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. Ruang lingkup ini meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan serta usaha, tempat tinggal, komunikasi serta informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata serta sektor strategis lainnya.

b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dibentuknya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, mengenai pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, dimaksudkan menjadi pedoman pada semua penyelenggara pelayanan publik untuk pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik yang menyesuaikan pada kewenangannya. Pedoman umum ini bertujuan guna mendukung terciptanya pelaksanaan pelayanan publik yang prima dengan artian pemenuhan harapan serta kebutuhan, pada pemberi ataupun penyelenggara ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam keputusan ini juga termuat asas-asas pelayanan publik meliputi: *Pertama*, Transparansi dimaksudkan melayani dengan terbuka serta mudah untuk diakses semua pihak yang membutuhkan, dan penyediaan pelayanan harus memadai serta mudah dimengerti. *Kedua*, Akuntabilitas dimaksudkan mampu mempertanggungjawabkan pelayanan sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, Kondisional dimaksudkan pelayanan mesti sesuai terhadap kondisi serta kemampuan pemberi dan penerima pelayanan, memiliki sifat efektif dan efisien. *Keempat*, Partisipatif berarti mendukung

keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan serta harapan masyarakat. *Kelima*, Kesamaan Hak berarti tidak diskriminatif, dimaksudkan tidak membedakan agama, golongan dan suku, ras, serta status ekonomi.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan ini berisi terkait partisipasi masyarakat pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Di dalam peraturan ini dimaksudkan bahwa partisipasi masyarakat ialah keterlibatan masyarakat guna menuangkan pemikiran, aspirasi, serta kepentingannya pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga termuat bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui Konsultasi publik, Penyampaian aspirasi, Rapat dengar pendapat umum, Kunjungan kerja, Sosialisasi, Seminar, Lokakarya atau diskusi.

Pada pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah berupaya mendorong partisipasi masyarakat dengan bentuk kemitraan. Partisipasi masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan memberikan hibah atau sumbangan dari masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dengan bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi Peraturan Pemerintah ini pada program Posyandu dan Jumantik yaitu dengan bentuk menjalin kemitraan, dalam hal ini dimaksudkan masyarakat dijadikan kader-kader kesehatan yang berguna untuk bekerja sama mencapai keberhasilan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

**d. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 191 Tahun 2017
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengintegrasian Layanan Sosial
Dasar di Pos Pelayanan Terpadu**

Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi Posyandu sebagai pusat pelayanan terpadu yang efektif dan efisien dalam menyediakan layanan sosial dasar kepada masyarakat. Posyandu merupakan suatu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan bersama masyarakat, yang berguna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar demi mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan Posyandu terdiri dari *pertama* penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita, *kedua* pelayanan gizi bayi dan balita meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin A, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan/atau pemulihan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi, *ketiga* pemberian Imunisasi dasar dan lanjutan pada usia 0-3 (nol sampai tiga) tahun, *keempat* pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada bayi dan balita usia 3-59 (nol sampai lima puluh sembilan) bulan; dan konseling dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak.

Dalam penyelenggaraan program Posyandu, pengelola program terdiri dari unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, yang bersedia, mampu dan memiliki waktu serta kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu. Masyarakat yang ikut serta bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menjadi pengelola posyandu disebut Kader Posyandu. Menjadi Kader Posyandu harus mengikuti pelatihan-pelatihan terkait bidang layanan Posyandu, kader terlatih dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Terdapat alur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Posyandu yang dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, penghargaan dan pelatihan, yakni sebagai berikut:

- 1) Sektoral terkait melalui Pokjanal Posyandu tingkat Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengintegrasian layanan sosial dasar dari Posyandu ke Pokjanal Posyandu tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- 2) Sektoral terkait melalui Pokjanal Posyandu tingkat Kota/Kabupaten Administrasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu ke Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan.
- 3) Sektoral terkait melalui Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar dari Posyandu ke Pokjanal Posyandu tingkat Kelurahan.
- 4) Sektoral terkait melalui Pokja Posyandu tingkat Kelurahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu.

Terdapat alur monitoring dan evaluasi di mana menjadi penilaian berkala untuk memastikan kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan, yakni sebagai berikut:

- 1) Pokjanal Posyandu tingkat Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di Kota/ Kabupaten Administrasi.
- 2) Pokjanal Posyandu tingkat Kota/Kabupaten Administrasi melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di Kecamatan.
- 3) Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di Kelurahan.

- 4) Pokja Posyandu tingkat Kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu.

2. Tinjauan Konsep dan Teori

a. Administrasi

Menurut Silalahi (dalam Hardi, 2020), pengertian istilah administrasi bagi masyarakat umum di Indonesia yaitu pelaksanaan ketatausahaan meliputi: tulis-menulis ataupun catat-mencatat, yang dilakukan oleh pegawai di kantor pemerintah. Menurut Ordway Tead (dalam Hardi, 2020), menyampaikan bahwa administrasi merupakan kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif pada suatu organisasi, yang memiliki tugas mengatur, memajukan serta memenuhi usaha kerjasama kelompok orang yang digabungkan untuk menggapai tujuan tertentu. Menurut Sondang P. Siagian (dalam Hardi, 2020), mengatakan bahwa administrasi ialah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, yang ikut serta dalam suatu bentuk usaha kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, didapatkan hal-hal yang penting dalam administrasi yaitu:

- 1) Terdapat dua orang atau lebih yang saling bekerjasama.
- 2) Terdapat suatu tujuan yang sudah ditetapkan bersama untuk dicapai.
- 3) Terdapat proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan praktik ketatausahaan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan sebuah proses kegiatan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih, yang saling bekerja sama berlandaskan prosedur atau aturan yang disepakati untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam melakukan proses kegiatan tersebut diperlukan ketersediaan sumber daya yang memadai baik manusia, ataupun keuangan.

b. Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Noverman Duadji, dkk, 2019), Administrasi publik merupakan cara terorganisirnya sumber daya dan personil publik, serta dikoordinasikan untuk merumuskan, menerapkan, dan juga dikelolanya (*manage*) keputusan-keputusan di dalam kebijakan publik. Administrasi publik ialah seni dan ilmu (*art and science*) yang difokuskan untuk mengatur publik affairs dan melakukan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu memiliki tujuan untuk menanggulangi masalah-masalah publik dengan perbaikan dan penyempurnaan terpenting pada bidang organisasi, sumber daya manusia serta keuangan.

Menurut Noverman, dkk (2019), *administration of public* menerangkan bagaimana peran pemerintah sebagai agen tunggal yang memiliki kuasa, yang aktif serta senantiasa berinisiatif untuk menata dan memilih langkah yang baik serta penting untuk masyarakat. Karena dinilai bahwa masyarakat merupakan pihak yang tidak aktif, kurang mampu, dan wajib patuh serta menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah. Pemerintah lebih memiliki peran untuk menjalankan tujuan memberikan pelayanan publik (*service provider*). Maka dimaksudkan pemerintah lebih responsif atau makin tanggap kepada kebutuhan masyarakat, serta lebih mengerti strategi yang baik dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat.

Menurut Nigro (dalam Noverman Duadji, dkk, 2019), mengatakan bahwa administrasi publik merupakan suatu upaya kerjasama kelompok di dalam lingkungan publik, yang meliputi ketiga bagian yakni yudikatif, legislatif, serta eksekutif. Di mana dalam merumuskan kebijakan publik memiliki peranan penting guna sebagai bagian pada proses politik.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintah dalam mengkoordinasikan,

memformulasikan, mengelola, serta mengimplementasikan kebijakan di suatu negara yang penting atau baik untuk masyarakat.

c. Pelayanan Publik

Menurut Sinambela (dalam Erlianti, 2019), Pelayanan Publik dimaksudkan suatu kegiatan penyelenggara negara dalam memenuhi keinginan serta kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik juga dimaksudkan sebagai pemberian pelayanan kebutuhan seseorang atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi, dengan tetap sesuai oleh aturan pokok serta prosedur yang telah ditetapkan. Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai tujuan pembentukannya.

Menurut Ratminto & Winarsih (dalam Erlianti, 2019), menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan seluruh jenis jasa pelayanan, dapat berupa barang publik ataupun jasa publik. Dengan prinsipnya merupakan tanggung jawab yang dilakukan pada Instansi Pemerintah di Pusat, maupun Daerah, serta pada Lingkungan BUMN ataupun BUMD, sebagai bentuk usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai bentuk penyelenggaraan ketetapan peraturan perundang-undangan.

Menurut Harbani Pasolong (dalam Muslimin, 2020), Pelayanan Publik ialah seluruh kegiatan yang dilakukan pada pemerintah kepada sebilang masyarakat, dengan mempunyai kegiatan yang akan menguntungkan pada sebuah kumpulan atau kesatuan, akan memberikan kepuasan walaupun hasilnya bukan hanya atas suatu produk secara fisik.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan suatu kegiatan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan pada Instansi Pemerintah di Pusat, maupun Daerah, serta pada Lingkungan BUMN ataupun BUMD. Pemberian layanan seluruh jenis jasa pelayanan, baik

dapat berupa barang publik ataupun jasa publik sesuai oleh aturan pokok serta prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bentuk upaya mencapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima, terdapat asas-asas yang perlu diterapkan. Menurut Lijan Poltak Sinambela, dkk (dalam Angkat dkk, 2018), menyebutkan asas-asas dalam pelayanan publik tercermin dari:

- 1) Transparansi yaitu memiliki sifat terbuka, serta mudah untuk diakses oleh seluruh pihak yang membutuhkan. Selain itu, disediakan dengan memadai serta mudah dipahami.
- 2) Akuntabilitas yaitu sesuai oleh ketentuan serta peraturan perundang-undangan dan mampu dipertanggungjawabkan.
- 3) Kondisional yaitu dimana bersifat menyesuaikan kondisi dan kemampuan pemberi serta penerima pelayanan, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- 4) Partisipatif yaitu mendorong keterlibatan masyarakat pada penyelenggaraan pelayanan publik dengan tetap mendengarkan aspirasi, dan harapan masyarakat serta sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Kesamaan Hak dan Tidak diskriminatif dimaksudkan berlaku secara adil dengan tidak membedakan perbedaan suku, agama, ras, golongan, gender ataupun status ekonomi.
- 6) Keseimbangan, dimaksudkan penerima dan pemberi pelayanan publik harus dapat memenuhi hak serta kewajiban masing- masing pihak.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa asas-asas dalam pelayanan publik memiliki peran penting dalam pelayanan publik, sehingga wajib untuk diterapkan dalam setiap proses pelayanan

publik. Dengan pemenuhan asas-asas tersebut, diharapkan dapat memberikan rasa puas kepada masyarakat dalam menerima pelayanan.

d. Pelayanan Kesehatan

Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo (dalam Putra & Kadnyanan, 2019), Pelayanan kesehatan merupakan suatu sub metode pelayanan kesehatan, di mana tujuan utamanya sebagai pelayanan preventif (pencegahan) serta promotif (peningkatan kesehatan) dengan masyarakat sebagai sasaran. Kemudian, Menurut Levey dan Loomba (dalam Pratiwi, dkk, 2013), mengatakan bahwa pelayanan kesehatan ialah segala usaha yang dilaksanakan sendiri ataupun dengan bersama-sama di suatu organisasi guna meningkatkan kesehatan, memelihara, mencegah, menyembuhkan penyakit dan mengembalikan kesehatan baik perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.

Menurut Notoatmodjo (dalam Iskandar, 2016), Pelayanan kesehatan merupakan seluruh kegiatan dalam memelihara serta meningkatkan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Kemudian, Menurut Mustofa dkk, (2019), Pelayanan kesehatan adalah suatu pelayanan yang diberikan dari pemerintah secara langsung ataupun melewati kerjasama kepada pihak masyarakat ataupun swasta. Pelayanan kesehatan sangat penting untuk diberikan serta dimotori oleh pemerintah, sebab pelayanan kesehatan ialah pelayanan dasar untuk masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan kesehatan merupakan suatu bentuk kegiatan atau usaha dalam suatu organisasi atau penyelenggara atau pemberi pelayanan, dengan tujuan memelihara, mencegah, menyembuhkan penyakit dan mengembalikan kesehatan baik perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.

Terdapat suatu bentuk kegiatan pemberian pelayanan kesehatan dengan bentuk pemberdayaan masyarakat dan dikelola bersama

masyarakat yang biasa disebut UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat). UKBM ini berguna untuk meningkatkan gerakan hidup sehat menjadi tempat gerakan pemberdayaan masyarakat, yang terbentuk didasarkan sebagai kebutuhan masyarakat sendiri yang akan dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat agar mampu memberdayakan dirinya sendiri dan dapat meningkatkan status kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat dengan harapan menjadi input dalam memutuskan arah pembangunan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Konsep Pemberdayaan Masyarakat pada bidang kesehatan yakni, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk usaha guna melahirkan kesadaran, keinginan serta kemampuan masyarakat untuk mengenali, menanggulangi, memelihara, melindungi serta memajukan kesejahteraan masyarakat sendiri. Pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan merupakan bentuk usaha dalam proses melahirkan kesadaran, keinginan, serta kemampuan untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan upaya kesehatan berbasis Masyarakat (UKBM) bertujuan untuk membangun kesadaran serta pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan, membangun kemampuan serta kemauan masyarakat untuk membantu kesehatan dirinya sendiri, membangun kehati-hatian masyarakat serta kesiapsiagaan supaya masyarakat mampu memahami berbagai risiko ataupun bahaya yang akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan, semacam wabah penyakit ataupun bencana pada lingkungannya. Fokus kegiatan dalam usaha surveilans yang berbasis masyarakat, urgensi kesehatan, penanggulangan bencana dan kesehatan pada lingkungan.

Terdapat beberapa program yang termasuk dalam Upaya Kesehatan Berbasis Pemberdayaan (UKBM) yaitu, Program Posyandu Balita, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Gerakan Pekerja Perempuan Sehat

Produktif (GP2SP), Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK), Posbindu PTM, Taman Obat Keluarga (TOGA), Jumentik (Juru Pemantau Jentik) dan Saka Bakti Husada.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih program Posyandu dan Jumentik untuk menjadi fokus penelitian. Karena seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang pada Survei Status Gizi Indonesia yang bersumber dari Kementerian Kesehatan., menyebutkan bahwa kesehatan pada anak di Indonesia masih menjadi salah satu prioritas, disebabkan masih tergolong rendah, dengan ini peneliti memilih program posyandu sebagai fokus penelitian ini.

Selain itu, Peneliti juga memilih program Jumentik disebabkan program ini sedang menjadi trend di masyarakat dan program Jumentik juga menjadi program yang aktif dan menonjol saat ini. Faktor lain peneliti mengangkat program Jumentik ini sudah dijelaskan di latar belakang pada survei kementerian kesehatan, menerangkan bahwa DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, berada pada urutan ke-5 dari 10 provinsi dengan jumlah kasus DBD terbanyak di Indonesia. Dengan adanya permasalahan ini, peneliti tertarik untuk mengangkat program Posyandu dan Jumentik yang dilakukan sebagai bentuk upaya dalam penanganan permasalahan tersebut.

e. Partisipasi Masyarakat

Menurut Keith Davis (dalam Hendro Letsoin, 2015), Partisipasi merupakan keikutsertaan pada kelompok secara mental, pikiran, moral maupun perasaan, guna mendorong dalam pemberian sumbangan terhadap kelompok sebagai upaya menggapai tujuan, serta bertanggung jawab atas upaya yang berkaitan. Partisipasi bukan hanya berdasarkan keikutsertaan secara fisik saja dalam pekerjaannya, melainkan melekat keterlibatan seluruh diri maka dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab serta sumbangan yang besar terhadap kelompok.

Menurut Andi Uceng dkk, (2019), Partisipasi masyarakat ialah bentuk terlibatnya masyarakat pada pelaksanaan identifikasi potensi serta permasalahan yang terdapat pada masyarakat, dalam pemilihan alternatif solusi serta pengambilan keputusan guna mengatasi permasalahan, dan juga keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan evaluasi perubahan yang terjadi. Kemudian, menurut Junanto (dalam Santoso & Moenek, 2018), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang mengadakan suatu kesempatan individu guna memengaruhi keputusan-keputusan publik serta dianggap sebagai komponen pada proses keputusan yang demokratis.

Menurut Masango (dalam Riyanto & Kovalenko, 2023), Dalam rumitnya isu-isu sosial, politik, serta ekonomi yang dialami pada negara sekarang ini, partisipasi masyarakat menjadi semakin penting. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif menjadikan kebijakan publik menjadi makin terbuka serta akuntabel. Sehingga, akan mewujudkan hasil yang semakin baik, dengan memberikan manfaat lebih terhadap masyarakat. Dengan ini, partisipasi masyarakat guna mampu memperkuat ikatan sosial serta kohesi masyarakat, dan kemampuan masyarakat meningkat guna menanggulangi masalah-masalah untuk dituntaskan dengan bersama-sama.

Kemudian, menurut Harris dkk (dalam Riyanto & Kovalenko, 2023), Partisipasi masyarakat memiliki tujuan untuk meninggikan kualitas serta efektivitas kebijakan publik serta pembangunan sehingga akan lebih memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Dan juga mendorong menciptakan negara menjadi lebih demokratis serta kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan pemberian suatu kesempatan kepada masyarakat atau keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat. Baik keterlibatan fisik, mental, pikiran, moral atau perasaan pada pelaksanaan

identifikasi potensi serta permasalahan yang terdapat pada masyarakat, dalam pemilihan alternatif solusi serta pengambilan keputusan guna mengatasi permasalahan, dan juga keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan evaluasi perubahan yang terjadi. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif menjadikan kebijakan publik menjadi makin terbuka serta akuntabel. Sehingga, akan mewujudkan hasil yang semakin baik untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas kebijakan publik serta pembangunan sehingga akan lebih memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Selain itu, juga mendorong serta menciptakan negara menjadi lebih demokratis dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Menurut Slamet (dalam Bappeda Buleleng, 2017), partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan, masyarakat terlibat pada kegiatan pembangunan, ikut mendapatkan manfaat serta merasakan hasil-hasil dari pembangunan. Saat ini partisipasi dijadikan kata kunci pada setiap program pembangunan masyarakat. Seakan-akan menjadi suatu “model baru” yang mesti melekat dalam setiap rumusan kebijakan ataupun proyek. Dalam pertumbuhannya berulang kali diucapkan ataupun ditulis berkali-kali, namun minim dipraktekkan akibatnya menjadi kehilangan makna. Partisipasi memiliki pengertian yang sama dengan peran serta, ikut serta, ataupun keterlibatan proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, serta melakukan tindakan pada beberapa anggota masyarakat.

Kemudian, menurut Slamet (dalam Bappeda Buleleng, 2017), menyebutkan bahwa terdapat tiga bentuk konsep partisipasi apabila dihubungkan oleh pembangunan masyarakat yang demokratis yakni:

- 1) Partisipasi politik (*political participation*), di mana partisipasi mengarah dengan meletakkan wakil-wakil rakyat untuk berpengaruh di dalam lembaga pemerintah, dibandingkan partisipasi aktif pada setiap mekanisme pemerintahan sendiri.

- 2) Partisipasi social (*social participation*), di mana menempatkan partisipasi pada proses pembangunan sebagai pihak luar. Dilaksanakan pada tahap konsultasi ataupun pemilihan suatu keputusan dimulai dari pertimbangan kebutuhan, pengamatan, penilaian dan penerapan. Dilakukannya partisipasi sosial guna mengoptimalkan mekanisme pembelajaran serta mobilisasi sosial. Proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri, tetapi ditujukan menjadi sarana pembelajaran serta mobilisasi sosial.
- 3) Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*), di mana pada pengambilan keputusan dalam lembaga ataupun proses pemerintahan memusatkan pada partisipasi langsung. Beralihnya konsep partisipasi warga di mana sebelumnya hanya sebatas kepedulian kepada penerima, menjadi suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keterlibatan warga pada penyusunan kebijakan serta pemilihan keputusan yang memberikan pengaruh pada kehidupan mereka.

Menurut Oakley (dalam malia, 2018), menyebutkan mengenai konsep partisipasi melalui pengelompokan menjadi tiga definisi dasar, yakni partisipasi sebagai kontribusi, organisasi, serta pemberdayaan. Aspek kontribusi masyarakat diuraikan dengan beberapa indikator yakni: kontribusi pemikiran, dana, tenaga serta sarana. Aspek pengorganisasian masyarakat diuraikan dengan beberapa indikator yakni: model pengorganisasian, struktur pengorganisasian, unsur-unsur pengorganisasian, dan fungsi pengorganisasian. Aspek pemberdayaan masyarakat diuraikan dengan beberapa indikator yakni: peran masyarakat, aksi masyarakat, motivasi masyarakat serta tanggung jawab masyarakat.

Oakley (dalam Jufrizal Nurman, 2020), menjelaskan bahwa menilai partisipasi menjadi proses aktif, di mana penerima manfaat atau kelompok memiliki pengaruh terhadap arah pada pelaksanaan proyek pembangunan, bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan mereka pada hal pendapatan, pertumbuhan pribadi, ataupun kemandirian. Terdapat tiga indikator

penting dalam partisipasi yaitu: 1) Keikutsertaan atau keterlibatan peran serta, pada indikator ini dapat diukur dari jumlah kehadiran masyarakat atau jumlah masyarakat yang aktif ikut serta dalam program pelayanan peningkatan kesehatan. 2) Kesiediaan atau Kesukarelaan, pada indikator ini dapat diukur dari konsistensi kehadiran masyarakat, dinilai dari masyarakat yang sukarela untuk terlibat, dan tidak terdapat unsur keterpaksaan. 3) Unsur tanggung jawab, dalam indikator ini dapat diukur dari ketersediaan masyarakat menjalankan perannya dalam program pelayanan peningkatan kesehatan.

Menurut Hamidjojo (dalam Syarifuddin, 2023), menyatakan bahwa partisipasi memiliki tiga pengertian, yakni turut ikut serta mengangkut beban pembangunan, menerima kembali hasil dari pembangunan serta bertanggung jawab terhadapnya. Kemudian, menurut Hamidjojo (dalam Irwanda & Burhanuddin, 2024), menyatakan bahwa sifat dan ciri-ciri dari partisipasi yakni sebagai berikut:

- 1) Partisipasi harus memiliki sifat sukarela
- 2) Beragam masalah atau isu mesti ditunjukkan dan dibicarakan dengan jelas serta objektif.
- 3) Keterangan ataupun informasi mengenai kesempatan untuk berpartisipasi harus didapatkan secara jelas serta memadai, mengenai tiap aspek atau arah tentang program yang mau dibicarakan.

Menurut Hamidjojo (dalam Rahmat Hidayat, dkk, 2023), menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat terbagi menjadi tiga aspek yakni, sebagai berikut:

- 1) Partisipasi Pikiran, merupakan partisipasi dalam bentuk sumbangan berupa ide, pendapat ataupun buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program ataupun untuk memperlancar pelaksanaan program serta untuk mewujudkannya, dengan memberikan

pengalaman serta pengetahuan berguna untuk mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

- 2) Partisipasi Keterlibatan, merupakan partisipasi dalam bentuk kehadiran, keikutsertaan, ataupun pemberian sumbangan tenaga yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan program.
- 3) Partisipasi Materi, merupakan partisipasi dalam bentuk sumbangan atau kontribusi berupa konsumsi, barang ataupun alat serta uang, dalam rangka membantu keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan program.

Dalam penelitian ini, untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat peneliti memilih menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Hamidjojo (dalam Rahmat Hidayat,dkk, 2023), di mana menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek penting dalam mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat meliputi: aspek partisipasi masyarakat bentuk pikiran, keterlibatan, serta materi. Peneliti memilih teori Hamidjojo dibandingkan teori lainnya, karena dinilai sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini dan indikator-indikator dalam teori tersebut dapat menggambarkan lebih detail bentuk partisipasi masyarakat dengan lebih konkret.

B. Konsep Kunci

Dalam penelitian ini, peneliti memetakan konsep kunci untuk membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar penelitian dapat dilakukan secara fokus serta efektif. Di mana konsep kunci ini menjadi inti dari permasalahan yang akan menjadi fokus utama, untuk diidentifikasi terkait indikator yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mengacu pada program peningkatan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Di mana terdapat dua program yang akan diteliti di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan

Utara, Kota Jakarta Barat, yaitu program Posyandu dan Jumantik (Juru Pemantau Jentik).

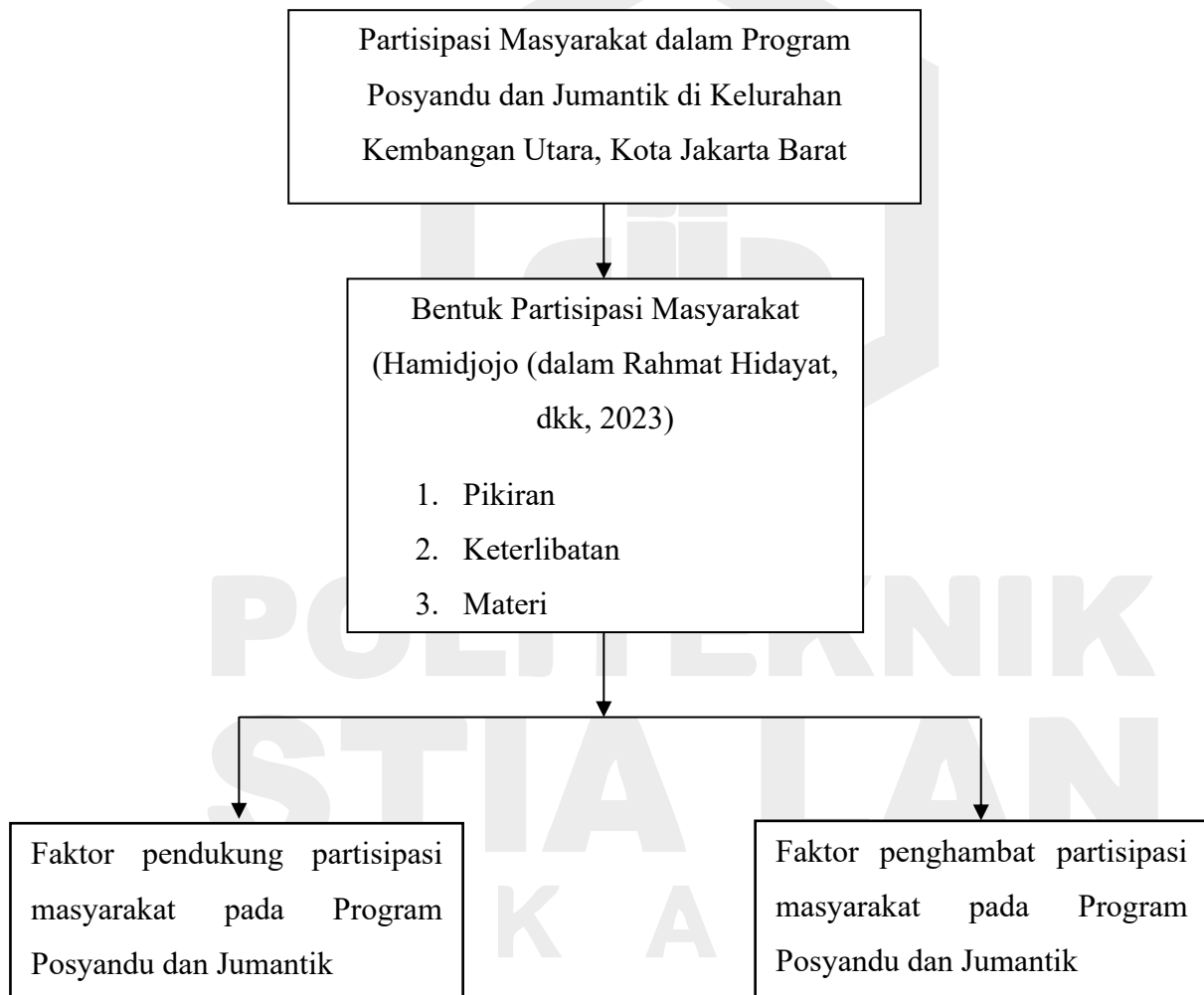
Peneliti memilih program Posyandu untuk menjadi fokus penelitian dikarenakan seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang pada Survei Status Gizi Indonesia yang bersumber dari Kementerian Kesehatan, menyebutkan bahwa kesehatan pada anak di Indonesia masih tergolong rendah sehingga masih menjadi salah satu prioritas negara, dengan ini peneliti memilih program posyandu sebagai fokus penelitian ini. Selain itu, peneliti juga memilih program Jumantik disebabkan program ini sedang menjadi trend di masyarakat dan program Jumantik juga menjadi program yang aktif dan menonjol saat ini. Faktor lain peneliti mengangkat program Jumantik ini, sudah dijelaskan di latar belakang pada survei kementerian kesehatan, menerangkan bahwa DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, berada pada urutan ke-5 dari 10 provinsi dengan jumlah kasus DBD terbanyak di Indonesia. Dengan adanya permasalahan ini, peneliti tertarik untuk mengangkat program Posyandu dan Jumantik yang dilakukan sebagai bentuk upaya dalam penanganan permasalahan tersebut.

Penelitian ini menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dan faktor pendukung serta penghambat partisipasi masyarakat menggunakan teori menurut Hamidjojo (dalam Rahmat Hidayat, dkk, 2023) dalam mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam program Posyandu dan Jumantik di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara, di mana terdapat tiga indikator yakni:

1. **Pikiran**, dalam indikator ini dapat mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran yang diberikan masyarakat.
2. **Keterlibatan**, dalam indikator ini dapat mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam program.
3. **Materi**, dalam indikator ini dapat mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam bentuk materi, memberikan kontribusi berwujud materi/uang.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan pustaka dan konsep kunci yang telah diuraikan diatas maka kerangka berpikir yang digunakan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:



Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil olahan peneliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah aturan yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data serta informasi, dalam menetapkan jawaban terhadap masalah yang diajukan serta mencapai tujuan dari penelitian. Tujuan pada penelitian ini untuk memberikan fakta terkait partisipasi masyarakat dalam program Posyandu dan Jumantik di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara, Kota Jakarta Barat. Dengan ini, peneliti memilih Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif untuk digunakan pada penelitian ini.

Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang didasarkan pemahaman terhadap suatu fenomena, dengan menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Pada penelitian kualitatif peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap objek penelitian sehingga didukung oleh pengetahuan yang luas. Dalam metode penelitian deskriptif ini, penelitian bersifat penggambaran suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.

Dalam konteks penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi serta menilai partisipasi masyarakat dalam implementasi program Posyandu dan Jumantik (Juru Pemantau Jentik), dalam pelayanan peningkatan kesehatan berbasis pemberdayaan di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara, Kota Jakarta Barat. Dengan ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dianggap paling cocok. Karena dalam metode ini dapat memaparkan dan menginterpretasikan data-data serta informasi yang sudah diperoleh dengan mencatat sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti, sehingga dapat mendapatkan gambaran secara umum serta menyeluruh mengenai fakta yang sebenarnya di lapangan (Kriyantono, dalam Akhmad K, 2015). Dengan mengenakan metode deskriptif, peneliti menelaah data yang terkumpul dengan bentuk kata-kata ataupun gambar. Data ini dapat

bersumber dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan ataupun memo serta dokumen resmi lainnya (Moleong dalam Akhmad K, 2015).

Dengan ini, peneliti menetapkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk digunakan pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atau makna mendalam mengenai fakta partisipasi masyarakat di lapangan sehingga mampu menjadikannya bahan perbaikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pelayanan peningkatan kesehatan berbasis pemberdayaan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data ialah teknik atau sebuah cara yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai data serta informasi yang digunakan untuk menganalisis pada proses penelitian, guna menjawab rumusan masalah yang dilampirkan. Dalam penelitian ini peneliti memakai tiga teknik untuk mengumpulkan data, yaitu Wawancara, Observasi dan Studi Dokumen.

1. Wawancara

Wawancara ialah teknik memperoleh data yang dihasilkan dengan proses tanya jawab secara lisan terhadap informan sehingga mampu diinterpretasi makna pada suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013). Dengan teknik wawancara ini peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait topik yang dibahas, dengan bertemu langsung pada informan. Dengan penyampaian informasi secara langsung, tentu dapat memperoleh jawaban lebih detail dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan terhadap informan.

Teknik wawancara pada penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara semi terstruktur yang berkaitan pada pertanyaan-pertanyaan yang berkonsentrasi pada konsep kunci, sehingga dapat memperoleh data dan informasi yang komprehensif dan tepat. Wawancara dilakukan menyesuaikan waktu luang narasumber atau saat hari pelaksanaan program.

Dalam melakukan teknik wawancara ini, peneliti secara sistematis dan lengkap menggunakan pedoman wawancara untuk mengumpulkan data atau informasi utama, selanjutnya pertanyaan dapat disesuaikan beriringan dengan alur wawancara berlangsung setelah terjawabnya pertanyaan utama.

Dengan ini, diharapkan menjadikan wawancara yang interaktif antara peneliti dengan informan, sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan data dan informasi mendalam terkait partisipasi masyarakat dalam program Posyandu dan Jumantik sebagai program peningkatan pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan. Dalam proses wawancara ini, Peneliti juga menggunakan perangkat yang mendukung, seperti buku catatan dan handphone untuk perekam suara dan pengambil gambar.

Terdapat informan kunci dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Narasumber	Status Narasumber	Tugas/Fungsi
1	Bapak M. Ridwan	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pemangku kepentingan dalam bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kembangan Utara.
2	Ibu Nurjanah	Kader Program Posyandu	Penggerak langsung atau Promotor kepada masyarakat pada pelaksanaan program Posyandu.
3	Ibu Niah	Kader Program Posyandu	Penggerak langsung atau Promotor kepada masyarakat pada pelaksanaan program Posyandu.
4	Ibu Melly Hastuti	Kader Program Posyandu	Penggerak langsung atau Promotor kepada masyarakat pada pelaksanaan program Posyandu.
5	Ibu Hasanah	Kader Program Jumantik	Penggerak langsung atau Promotor kepada masyarakat pada pelaksanaan program Jumantik.
6	Ibu Lilis	Kader Program Jumantik	Penggerak langsung atau Promotor kepada masyarakat

			pada pelaksanaan program Jumantik.
7	Ibu Maryanti	Kader Program Jumantik	Penggerak langsung atau Promotor kepada masyarakat pada pelaksanaan program Jumantik.
8	Ibu Risa Mariana S.	Masyarakat Penerima pelayanan Program Posyandu	Masyarakat sebagai penerima layanan program Posyandu.
9	Ibu Sri Yani	Masyarakat Penerima pelayanan Program Posyandu	Masyarakat sebagai penerima layanan program Posyandu.
10	Ibu Irma Firiyani	Masyarakat Penerima pelayanan Program Posyandu	Masyarakat sebagai penerima layanan program Posyandu.
11	Ibu Elva Febrianti	Masyarakat Penerima pelayanan Program Jumantik	Masyarakat sebagai penerima layanan program Jumantik.
12	Ibu Jarwati	Masyarakat Penerima pelayanan Program Jumantik	Masyarakat sebagai penerima layanan program Jumantik.
13	Ibu Nila	Masyarakat Penerima pelayanan Program Jumantik	Masyarakat sebagai penerima layanan program Jumantik.

Sumber:Hasil Olahan Peneliti

2. Observasi

Observasi merupakan teknik perolehan data yang dilaksanakan melalui pengamatan terhadap subjek yang diteliti, di mana dapat menghasilkan data berupa gambaran sebenarnya pada lapangan atau lokasi penelitian, dengan bentuk kondisi, aktivitas, sikap, tindakan, ataupun interaksi interpersonal (A.A. Mekarisce, 2020).

Dalam perolehan data melalui observasi ini, peneliti melaksanakan pengamatan secara langsung pada pelaksanaan program Posyandu dan Jumantik (Juru Pemantau Jentik) di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara, untuk mengamati kondisi dan aktivitas pada kegiatan berlangsung. Hal-hal yang diamati peneliti berdasarkan pada indikator-indikator dalam teori partisipasi masyarakat Hamidjojo (dalam Rahmat

Hidayat, dkk, 2023. Dimana terdapat beberapa aspek yang diamati seperti kehadiran, keikutsertaan masyarakat, kontribusi materi yang ada pada saat pelaksanaan program. Dengan pengamatan ini membantu peneliti dalam memperoleh data sesuai dengan kondisi realitas yang ada.

3. Studi Dokumen

Studi Dokumen dapat melengkapi penggunaan teknik observasi serta wawancara pada penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data ini diperoleh dengan menelusuri, mengumpulkan data, mencatatkan data tertulis dan informasi ilmiah dari hasil survei penelitian sebelumnya, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, serta dokumen yang berkaitan pada pendapat dan teori dari para ahli serta peraturan-peraturan hukum, yang memiliki kaitan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2013).

C. Instrumen Penelitian

Di dalam penelitian, Instrumen penelitian dimaksudkan sebagai alat yang dipakai peneliti guna memudahkan pengumpulan berbagai data, dengan hasil yang lebih lengkap, untuk selanjutnya diolah, dianalisa dan disajikan secara sistematis dan objektif yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dilampirkan pada penelitian. Dengan ini, termuat beberapa instrumen penelitian yang dipakai guna mendukung proses pengumpulan data pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan suatu panduan atau instrumen yang peneliti gunakan dalam melakukan kegiatan wawancara guna mengumpulkan data. Dengan pedoman wawancara dapat memudahkan peneliti untuk mengingat tentang apa saja point-point yang harus dibahas dalam berlangsungnya kegiatan wawancara, agar mencegah terdapat point pertanyaan yang tertinggal sehingga peneliti mendapatkan data secara lengkap. Seluruh pertanyaan disusun sebaik mungkin untuk memungkinkan

informan menyampaikan pengalaman, pendapat ataupun perspektif mereka secara gamblang dan terperinci. Pedoman wawancara ini digunakan hanya sebagai panduan dan dapat berubah melihat pada kebutuhan serta kondisi yang ada pada lapangan. Pada penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, di mana tetap menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, namun dapat menambahkan pertanyaan apabila butuh informasi secara lebih detail dari jawaban informan.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi merupakan suatu panduan atau instrumen yang peneliti gunakan dalam melakukan kegiatan observasi atau pengamatan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek penelitian, di mana nantinya pedoman ini mengarahkan peneliti untuk melihat serta memeriksa aspek-aspek yang perlu diamati secara sistematis sesuai dengan konsep kunci penelitian. Dengan pedoman observasi ini tentunya memudahkan peneliti untuk memfokuskan pengamatan yang dilakukan dalam mengamati aktivitas, kondisi ataupun interaksi di lapangan.

3. Pedoman Studi Dokumen

Pedoman studi dokumen merupakan suatu panduan atau instrumen yang peneliti gunakan dalam melakukan pengumpulan informasi dengan menelusuri, mengumpulkan data, mencatatkan data tertulis pada sebuah dokumen seperti jumlah penduduk, pendidikan terakhir penduduk, jumlah kader program dan lain-lain.

4. Perangkat Penunjang Lapangan

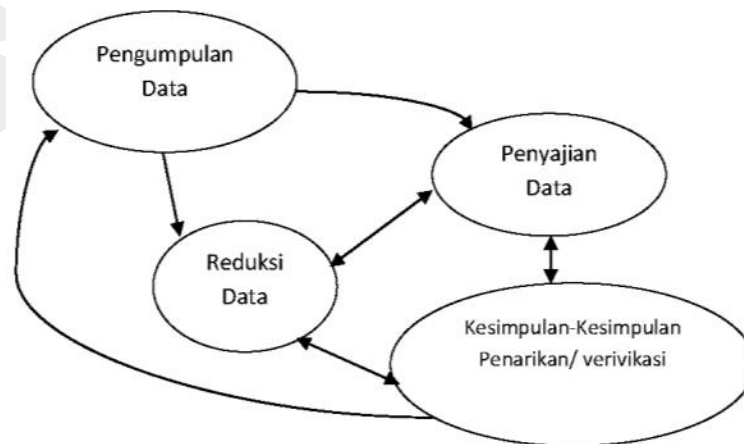
Perangkat penunjang lapangan ialah perangkat atau alat yang digunakan guna mendukung berlangsungnya proses penelitian. Alat yang dipakai pada proses pelaksanaan penelitian meliputi: Handphone yang berguna untuk merekam serta mendokumentasikan kegiatan, Buku catatan serta alat tulis

yang berguna untuk mencatat informasi-informasi penting yang diperoleh, serta Laptop dan Internet yang berguna untuk memperoleh data sekunder dan pengarsipan data yang diperoleh pada penelitian.

D. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data pada penelitian kualitatif merupakan sebuah kegiatan atau proses untuk mengelola, menyusun, mengelompokkan, memberi tanda ataupun kode, serta mengkategorikannya. Sehingga, memperoleh suatu temuan yang didasari pada fokus atau masalah yang dijawab. Dengan seluruh proses tersebut, data kualitatif yang umumnya berhamburan serta bertimbun-timbun disederhanakan agar dapat dimengerti dengan mudah. Dalam analisis data dijabarkan proses pengelolaan secara teratur mulai dari catatan lapangan, transkrip-transkrip wawancara, serta bahan-bahan lain sehingga suatu penemuannya dapat peneliti sajikan (Sirajuddin Saleh, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman (dalam Sirajuddin S, 2017) sebagai teknik pengolahan data. Di mana proses pengolahan data meliputi tiga alur kegiatan, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Alur Analisis Data/Pengolahan Data Miles dan Huberman

Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sirajuddin S, 2017)

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah aktivitas menentukan hal-hal yang utama, merangkum, memfokuskan dari hal-hal terpenting. Mengingat jumlah data dari lapangan terkumpul cukup banyak dan kompleks sehingga butuh penyederhanaan dengan teliti. Dalam penelitian ini ada proses reduksi data dari hasil wawancara serta observasi. Di mana data yang terkumpul dari aktivitas wawancara dan observasi melimpah, maka butuh dilakukan analisis, membuang data-data yang tidak penting dan meringkas mencari data yang paling relevan dan sesuai fokus penelitian pada konsep kunci. Dengan ini, data yang sudah direduksi nantinya mampu disajikan dengan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian data

Setelah dilakukannya proses reduksi, maka kemudian peneliti melakukan proses penyajian data. Dalam proses penyajian data, peneliti merangkum dan menyajikan kumpulan informasi yang banyak dan pelik menjadi bentuk yang lebih teratur dan terarah. Sehingga, menjadi makin sederhana dan selektif, serta mampu dengan mudah dipahami maknanya. Penyajian data dapat dilakukan berupa uraian singkat atau narasi, bagan, maupun tabel. Penyajian data ini bertujuan untuk menggabungkan data yang sudah direduksi dalam bentuk narasi maupun tabel sehingga dapat menggambarkan realitas keadaan yang terjadi secara jelas dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam mekanisme menarik suatu kesimpulan, peneliti melakukan penarikan makna atau intisari secara sederhana dari data yang telah disajikan sebelumnya. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan menjadi suatu temuan baru di mana sebelumnya belum sempat ada. Temuan ini dapat berbentuk deskripsi ataupun gambaran pada suatu objek yang sebelumnya masih

remang-remang atau gelap, namun setelah dilakukan penelitian menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, atau teori. Apabila data benar-benar sudah lengkap dan dianggap kredibel maka dapat diambil kesimpulan akhir.

Kemudian, untuk menguji dan memvalidasi keabsahan atau keaslian data penelitian, peneliti menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik, di mana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber yakni menguji kredibilitas data dengan melakukan pengecekan data yang telah didapatkan dari beberapa sumber. Pada penelitian ini peneliti melakukan perbandingan dan penggabungan terkait informasi dari sumber satu dengan sumber lainnya. Peneliti melakukan dengan cara mengkonfirmasi sumber informasi dengan wawancara kepada informan satu dengan informan lainnya mengenai partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program Posyandu dan Jumantik di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara. Dengan ini peneliti dapat melihat sumber informasi dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda, kemudian melakukan penggabungan serta perbandingan dari data yang diperoleh dan dilakukan penarikan kesimpulan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik yakni menguji kredibilitas data dengan melakukan pengecekan data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan dengan melakukan penggabungan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Dengan ini peneliti menunjukkan data mengenai partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program Posyandu dan Jumantik di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Letak Wilayah

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kelurahan Kembangan Utara khususnya di RW.01 dan RW.06. Kelurahan Kembangan Utara merupakan Kelurahan yang berada di Kecamatan Kembangan, yang tepatnya terletak di Kota Administrasi Jakarta Barat. Kelurahan Kembangan Utara memiliki luas wilayah 364,675 Ha, yang terdiri dari 11 RW (Rukun Warga) dengan 117 RT (Rukun Tetangga). Di mana terdapat 2 RW yang merupakan kawasan elite yaitu RW 011 serta RW 09.

Pusat Pemerintahan Kelurahan Kembangan Utara, Kota Jakarta Barat ini berlokasi di Jl. H. Saanan No.2, RT.4/RW.2, Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11610, Indonesia. Dengan batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kelurahan Kembangan Utara yakni, di sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kelurahan Rawa Buaya dan Kedaung Kali Angke, di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Kembangan Selatan yang berbatasan di sebelah barat dan Selatan.

b. Visi dan Misi

Dalam rangka melaksanakan pelayanan publik pada tingkat Kelurahan, pemerintah Kelurahan Kembangan Utara, mempunyai Visi yakni, “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas, Cepat, dan Tepat dengan Menempatkan Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan”.

Untuk mencapai visi tersebut, Kelurahan Kembangan Utara mempunyai lima Misi yakni, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.

- 2) Membudayakan Pola Hidup Bersih & Sehat.
- 3) Melestarikan dan meningkatkan Derajat Lingkungan Masyarakat.
- 4) Menciptakan Situasi yang Aman, Tertib & Kondusif.
- 5) Meningkatkan Peran Serta Aktif Masyarakat dalam tugas-tugas Pemerintahan.

c. Jumlah Kependudukan

Berdasarkan data kependudukan terbaru Kelurahan Kembangan Utara, jumlah penduduk Kelurahan Kembangan Utara berjumlah 60.021 penduduk, dengan jumlah Kartu Keluarga sebanyak ±18.610. Dan juga memiliki jumlah Balita sebanyak 2.512 anak.

d. Pendidikan Terakhir Penduduk

Berdasarkan data Kelurahan Kembangan Utara, penduduk di Kelurahan Kembangan Utara memiliki Tingkat pendidikan akhir yang bermacam-macam. Di mana hal ini akan berhubungan dengan kemampuan ekonomi masing-masing masyarakat. Berikut pendidikan terakhir penduduk Kelurahan Kembangan Utara, yakni:

Tabel 4. 1 Pendidikan Terakhir Masyarakat Kelurahan Kembangan Utara

No.	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tamat SD	5.028
2	Tamat SMP	5.014
3	Tamat SMA/SMK	11.816
4	Tamat Universitas	8.451

Sumber: Dokumen Kelurahan Kembangan Utara, 2023

Pada tabel diatas, dapat terlihat bahwa tamatan paling banyak di Kelurahan Kembangan Utara merupakan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jumlah 11.816 penduduk.

e. Jumlah Posyandu

Pada wilayah RW. 01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara terdapat 6 Posyandu, sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Daftar Posyandu di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara

No.	Nama Posyandu	Lokasi
1	Posyandu Cempaka 1	Berlokasi di RW 01
2	Posyandu Cempaka 2	Berlokasi di RW 01
3	Posyandu Kamboja 1	Berlokasi di RW 06
4	Posyandu Kamboja 2	Berlokasi di RW 06
5	Posyandu Kamboja 3	Berlokasi di RW 06
6	Posyandu Kamboja 4	Berlokasi di RW 06

Sumber: Dokumen Posyandu Kelurahan Kembangan Utara, 2023

Pada penelitian ini peneliti melakukan purposive sampling dengan melakukan observasi di dua Posyandu yaitu Posyandu Kamboja 1 dan Posyandu Cempaka 2.

f. Jumlah Kader

Dalam pelaksanaan pelayanan program Posyandu dan Jumantik, terdapat kader yang berperan serta bertugas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan langsung terhadap masyarakat. Pada Kelurahan Kembangan Utara ini memiliki jumlah kader sebanyak 167 kader Posyandu dan 92 kader Jumantik.

Berikut rincian jumlah kader Posyandu:

Tabel 4. 3 Daftar Jumlah Kader Posyandu

No.	Nama Posyandu	Jumlah Kader
1	Posyandu Cempaka 1	13 orang
2	Posyandu Cempaka 2	8 orang
3	Posyandu Sekar Melati 1	10 orang
4	Posyandu Sekar Melati 2	13 orang
5	Posyandu Sekar Melati 3	9 orang
6	Posyandu Melati 1	10 orang

7	Posyandu Melati 2	9 orang
8	Posyandu Melati Indah 1	5 orang
9	Posyandu Melati Indah 2	5 orang
10	Posyandu Melati Indah 3	6 orang
11	Posyandu Sedap Malam	12 orang
12	Posyandu Kamboja 1	7 orang
13	Posyandu Kamboja 2	5 orang
14	Posyandu Kamboja 3	5 orang
15	Posyandu Kamboja 4	5 orang
16	Posyandu Kenanga	7 orang
17	Posyandu Anggrek 1	10 orang
18	Posyandu Anggrek 2	13 orang
19	Posyandu Dahlia 1	7 orang
20	Posyandu Dahlia 2	8 orang
Total		167 orang

Sumber: Dokumen Kelurahan Kembangan Utara, 2023

Berikut rincian jumlah kader Jumantik:

Tabel 4. 4 Daftar Jumlah Kader Jumantik

No.	Lokasi RW	Jumlah Kader
1	RW 01	9 orang
2	RW 02	10 orang
3	RW 03	7 orang
4	RW 04	11 orang
5	RW 05	16 orang
6	RW 06	15 orang
7	RW 07	8 orang
8	RW 08	7 orang
9	RW 09	-

10	RW 010	9 orang
11	RW 011	-
Jumlah		92 orang

Sumber: Dokumen Kelurahan Kembangan Utara, 2023

g. Tugas Kader Posyandu dan Jumantik

Kader Posyandu mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesehatan pada tingkat Kelurahan. Berikut merupakan tugas dari kader Posyandu:

1) Sebelum Pelaksanaan kegiatan Posyandu

- a) Kader bertugas menyebarluaskan informasi mengenai hari pelaksanaan Posyandu.
- b) Melakukan pembagian tugas antar kader yang terbagi menjadi kader yang menangani pendaftaran, penimbangan, pencatatan, pemberian makanan tambahan.
- c) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti timbangan, alat ukur, dan lainnya.
- d) Mempersiapkan Pemberian Makanan Tambahan.
- e) Melakukan koordinasi kepada petugas kesehatan terkait jenis pelayanan yang akan diselenggarakan, contoh terdapat pemberian vaksin, vitamin atau sebagainya.

2) Pada Pelaksanaan kegiatan Posyandu

- a) Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu.
- b) Melaksanakan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita.
- c) Mencatat hasil penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita pada buku KIA atau KMS, serta mengisi buku register Posyandu.

- d) Menyampaikan kepada orang tua terkait perkembangan anak balita, serta memberikan penyuluhan terkait pola asuh balita dan kesehatan balita supaya anak tumbuh dengan sehat dan cerdas.

3) Setelah Pelaksanaan Kegiatan Posyandu

Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader dan petugas kesehatan melengkapi pencatatan serta mengevaluasi atau membahas hasil kegiatan yang telah dilakukan serta tindak lanjutnya.

Selanjutnya Kader Jumantik, Kader Jumantik mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesehatan pada tingkat Kelurahan. Berikut merupakan tugas dari kader Jumantik:

- 1) Membuat perencanaan jadwal kunjungan atau pengecekan seluruh rumah pada wilayah kerja kader.
- 2) Menyebarluaskan informasi mengenai hari pelaksanaan kegiatan PSN Jumantik.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap jentik nyamuk, dan mengawasi masyarakat dalam Gerakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) di lingkungan kerja kader.
- 4) Melakukan pencatatan rekapitulasi hasil pemeriksaan jentik, yang nantinya akan dilaporkan kepada pihak puskesmas setiap satu bulan sekali.
- 5) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait teknis pelaksanaan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan pemberian himbauan kepada masyarakat untuk selalu melakukan PSN mandiri.

2. Hasil Penelitian

Dalam bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan sejak 10 Januari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024 dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi

dokumen. Data tersebut dijelaskan sesuai dengan fokus penelitian yakni: (1) Bentuk partisipasi masyarakat pada program Posyandu dan Jumantik di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara, diidentifikasi dengan menggunakan tiga indikator yang terdiri dari bentuk Partisipasi Pikiran, Partisipasi Keterlibatan, dan Partisipasi Materi. (2) Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat pada Program Posyandu dan Jumantik di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara. Berikut sebagaimana dapat dijabarkan dibawah ini.

a. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Program Posyandu

Pada dasarnya, Posyandu merupakan suatu bentuk upaya dalam mengontrol tumbuh kembang anak agar anak terhindar dari risiko kekurangan gizi ataupun gizi buruk. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang secara umum dapat diberikan oleh masyarakat dalam program Posyandu, di mana terbagi menjadi tiga bentuk partisipasi masyarakat, yakni partisipasi dalam bentuk Pikiran, Keterlibatan dan yang terakhir dalam bentuk Materi. Ketiga aspek tersebut dapat dilihat dari hasil penjabaran penelitian sebagai berikut:

1) Partisipasi Pikiran

Partisipasi dalam bentuk pikiran ini berisi mengenai partisipasi masyarakat dalam memberikan sebuah pembahasan berupa ide atau gagasan, saran-saran, pendapat atau buah pikiran yang membangun, baik dalam penyusunan program ataupun untuk mendukung jalannya pelaksanaan program. Selain itu, memberikan pengalaman serta pengetahuan, untuk mengembangkan kegiatan yang yang diadakan dalam program Posyandu. Demi tercapainya suatu keberhasilan program, masyarakat harus ikut berpartisipasi secara langsung pada setiap prosesnya, salah satunya berpartisipasi dalam memberikan atau menuangkan ide-ide pikiran mereka.

a) Partisipasi dalam bentuk pikiran masyarakat sebagai kader Posyandu

Pada bagian ini berisi mengenai partisipasi masyarakat sebagai kader dalam bentuk pikiran, dengan memberikan sebuah ide, gagasan, saran, kritik, pendapat ataupun buah pikiran yang membangun baik dalam penyusunan kegiatan program Posyandu, pelaksanaan kegiatan Posyandu dan evaluasi program Posyandu.

Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Kader Program Posyandu Ibu Nurjanah pada tanggal 1 Februari 2024, terkait partisipasi kader dalam bentuk pikiran: “Kalo penyusunan kegiatan biasanya kader udah di infomarsiin sama pihak puskesmas, kalo saya sebagai masyarakat sekaligus kader menampung aja saran-saran dari masyarakat biasanya si terkait menu PMT atau apapun itu”.

Pernyataan lain dari Ibu Niah selaku Kader Posyandu pada tanggal 26 Januari 2024, menyebutkan bahwa: “Saya jadi kader biasanya ngasih pendapat juga kalo ada evaluasi sama puskesmas terkait anak yang mengalami stunting ataupun gizi buruk, kita bermusyawarah sama-sama bagaimana nih langkah yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut”.

Pernyataan ini juga sejalan, dengan pernyataan Ibu Melly Hastuti selaku Kader Posyandu pada tanggal 1 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Kalo kegiatan biasanya udah dapet penjadwalan jadi kita kader cuma mengikuti aja, kalo untuk pemberian kritik atau saran dari masyarakat, saya ikut nyampein ke pihak kelurahan misalnya terkait fasilitas yang kurang atau lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan pernyataan kader program Posyandu bahwa terdapat partisipasi dalam bentuk pikiran yang diberikan seperti pemberian pendapat

pada saat evaluasi program Posyandu bersama pihak puskesmas, menyampaikan saran yang telah masyarakat berikan pada saat pelaksanaan kegiatan Posyandu kepada pihak kelurahan. Pada dasarnya kader sebagai promotor program sekaligus masyarakat ikut memberikan partisipasi dalam bentuk pikiran sebagai suatu acuan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan Posyandu.

b) Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran pada program Posyandu

Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Kader Program Posyandu Ibu Nurjanah pada tanggal 1 Februari 2024, terkait partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran:

Kalo untuk penyusunan kegiatan biasanya hanya kader dengan arahan pihak puskesmas, kalo masyarakat paling kadang ada ibu yang datang ke Posyandu kasih saran untuk menu makan PMT misalnya di variasiin lagi jangan bubur kacang ijo aja, paling itu aja si neng.

Hal ini juga disampaikan Ibu Niah selaku Kader Posyandu pada tanggal 26 Januari 2024, menyebutkan bahwa: “Belum ada si neng kalo ngasih saran gitu, kadang ada yang malu juga atau segan mungkin ya neng kalo menurut saya, kalo saya sih belum denger ada ibu-ibu ngasih saran pas lagi Posyandu”.

Pernyataan ini juga sejalan, dengan pernyataan Ibu Melly Hastuti selaku Kader Posyandu pada tanggal 1 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Ibu-ibu disini kalau untuk ngasih ide-ide si belum ada ya neng, mereka mah udah ikut datang aja pas hari pelaksanaanya”.

Peneliti juga menanyakan kepada masyarakat yang mengikuti program Posyandu, untuk mengetahui pernyataan dari masyarakat terhadap partisipasi masyarakat sendiri dalam bentuk pikiran pada program Posyandu. Berdasarkan informasi dari wawancara kepada

Ibu Risa Mariana S. pada tanggal 1 Februari 2024, terkait partisipasi dalam bentuk pikiran:

Kalo saya sendiri sampe sekarang belum pernah ngasih pendapat atau ide-ide untuk kegiatan posyandu, tapi kalo ada kesempatan dari kader, ada kader yang mempersilahkan, saya mau memberikan saran-saran untuk menarik ibu dan anak balita yang mau dateng biar makin ramai yang berpartisipasi.

Hal ini juga disampaikan oleh pernyataan Ibu Sri Yani pada tanggal 1 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Memberikan saran, pendapat atau ikut evaluasi kegiatan posyandu saya belum pernah, kayaknya di posyandu sini nggak ada evaluasi kegiatan sama masyarakat mba”.

Pernyataan ini juga sejalan, dengan pernyataan Ibu Irma Fitriyani pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Kalo aku si ikut kadernya aja, malu jadi belum pernah ngasih ide,saran, lagi juga menurut aku udah cukup baik kegiatan Posyandunya sampai saat ini berjalan lancar”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran pada program Posyandu. Masyarakat masih malu atau enggan untuk memberikan pendapat yang membangun guna perbaikan kegiatan program Posyandu. Selain itu, belum adanya kader posyandu yang meminta masyarakat untuk memberikan saran dan kritik dalam pelaksanaan program posyandu, sehingga masyarakat juga merasa belum ada wadah yang dapat mereka manfaatkan untuk memberikan ide, pendapat, saran, ataupun kritik yang membangun untuk kegiatan program Posyandu.

2) Partisipasi Keterlibatan

Dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan program maka diperlukan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tentunya berguna untuk mencapai tujuan bersama, dengan terlibatnya masyarakat dapat menghasilkan rencana yang sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Bentuk partisipasi ini dapat berupa keikutsertaan dan kehadiran masyarakat pada pelaksanaan program Posyandu, ataupun pemberian sumbangan tenaga masyarakat untuk bekerja sama menjadi promotor program Posyandu, di mana dapat menunjang suatu kegiatan sehingga dapat terealisasi secara maksimal, demi tercapainya tujuan bersama yakni mensejahterakan masyarakat.

a) Keterlibatan masyarakat untuk menjadi kader Posyandu

Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Kembangan Utara Bapak M.Ridwan pada tanggal 26 Januari 2024, terkait partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat untuk menjadi kader program Posyandu:

Keterlibatan masyarakat untuk mau menjadi kader Posyandu maupun Jumantik sudah cukup banyak ibu-ibu yang tertarik, namun memang kita dibataskan oleh jumlah kuota yang ada di masing-masing wilayah. Tetapi terdapat dua wilayah di RW 9 dan RW 11 disana wilayah komplek, Di wilayah komplek kami kesulitan untuk mencari masyarakat yang mau terlibat menjadi kader Jumantik ataupun Posyandu. Karena masyarakat menilai apa sih kerjaan kader, dan selalu berpikiran apa sih yang saya dapat. Karena kan kader itu memang kerja sosial, tidak ada gaji paling dapat apresiasi sedikit dari kelurahan.

Peneliti juga menanyakan kepada kader program Posyandu, untuk mengetahui pernyataan langsung dari kader, bahwa apa yang melatarbelakangi mereka mau atau bersedia terlibat menjadi kader pada program Posyandu di RW.01 dan RW.06 Kelurahan

Kembangan Utara, dimana pekerjaan kader ini merupakan pekerjaan sosial yang tidak mendapatkan upah, hanya mendapatkan sedikit apresiasi dari Kelurahan.

Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Ibu Nurjanah selaku Kader Program Posyandu pada tanggal 1 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Awalnya dulu karena saya RT ya jadi saya aktif serta dalam kegiatan program-program, sekarang masih menjadi kader untuk mengisi waktu senggang karena sudah biasa aktif juga dan nambah-nambah pengalaman”.

Pernyataan lain dari Ibu Niah selaku Kader Posyandu pada tanggal 26 Januari 2024, menyebutkan bahwa: “Selain mengisi waktu luang, saya bersedia juga karena merasa simpati di lingkungan RT saya, saat ini masih banyak yang belum mengetahui apa pentingnya posyandu dan manfaatnya sebesar apa, dari situ si neng hati tergerak untuk ikut terlibat”.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Melly Hastuti selaku Kader Posyandu pada tanggal 1 Februari 2024, menyebutkan bahwa:

Sebelumnya saya kader dasawisma. Karena kader Posyandu harus ada perwakilannya satu kader Per Rt, kebetulan ibu-ibu yang lainnya sudah pada berumur pada gabisa jadi kader. Jadi saya yang maju, saya mau jadi kader Posyandu karena sudah biasa ngiinin anak-anak jadi tertarik gabung kader Posyandu, seneng aja liat anak kecil.

Berdasarkan hasil studi dokumen peneliti, terdapat 167 kader Posyandu di lingkungan Kelurahan Kembangan Utara. Jumlah kader pada Posyandu terbilang sudah cukup banyak, sehingga tidak kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam mempromotor program Posyandu, dengan ini kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara dan studi dokumen peneliti dapat disimpulkan bahwa sudah cukup banyak masyarakat yang tertarik untuk terlibat menjadi kader Posyandu, walaupun kader merupakan

pekerja sosial yang tidak mendapatkan upah. Tetapi ibu-ibu tetap bersedia untuk terlibat menjadi kader dalam program Posyandu dengan dilatarbelakangi oleh rasa simpati pada lingkungan sekitar karena masih banyak yang belum mengetahui pentingnya Posyandu dan kebermanfaatannya demi terciptanya lingkungan yang sehat. Tidak diberikannya upah bukan menjadi alasan mereka untuk tidak terlibat, ibu-ibu kader tetap bersedia terlibat. Mereka mengambil manfaat dari keterlibatannya untuk dapat mengisi waktu luang sebagai ibu rumah tangga, dan menambah pengalaman mereka.

b) Keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan program Posyandu

Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Kembangan Utara Bapak M.Ridwan pada tanggal 26 Januari 2024, terkait partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat pada program Posyandu:

Kalo untuk masyarakat yang mau mengikuti program, mau terlibat dalam program Posyandu dan Jumantik saat ini juga cukup tinggi walaupun masih ada yang belum tergerak untuk terlibat, tapi kalo kita pihak Kelurahan nilai sudah 80% lah masyarakat yang mau ikut serta.

Pernyataan lain dari Ibu Nurjanah selaku Kader Program Posyandu pada tanggal 1 Februari 2024, menyebutkan bahwa:

Banyak yang ikut terlibat di program posyandu, waktu itu kita punya balita kurang lebih 200, sekarang karena balitanya sudah besar kita berjumlah 162 balita. Cuma ga konsisten aja kehadirannya kadang ibu nya malas datang kalo tidak ada pemberian vitamin. Ada yang bolong-bolong alesanya balitanya tidur jadi ibunya males alesanya anaknya tidur, ada juga yang males karena timbanganya ga naik-naik.

Pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan Ibu Niah selaku Kader Posyandu pada tanggal 26 Januari 2024, menyebutkan bahwa: “Lumayan banyak yang mau ikut hadir ke posyandu apalagi

kalo ada vitamin. Walaupun kadang ada yang males, ada yang rajin, jadi tergantung kemauan masing-masing”.

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh Ibu Melly Hastuti selaku Kader Posyandu pada tanggal 1 Februari 2024, menyebutkan bahwa:

Keterlibatan masyarakat dalam mempersiapkan kegiatan tidak ada neng, tapi untuk keterlibatan dalam pelaksanaan Posyandu di sini lumayan banyak yang hadir. Apalagi kalo ada pemberian vitamin lebih banyak yang hadir, Februari dan Agustus itu jadwal pemberian vitamin pasti membludak neng yang dateng. Kalo lagi vitamin ini kaya hari ini bisa 100an, kalo lagi gada paling 70an aja.

Adapun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti saat pelaksanaan program Posyandu, menunjukan bahwa kenyataan dilapangan keterlibatan masyarakat atau kehadiran masyarakat yang memiliki balita posyandu sudah terbilang cukup banyak.



Gambar 4. 1 Kehadiran Masyarakat Pada Pelaksanaan Posyandu

Sumber: Dokumen Peneliti

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan pada pelaksanaan program Posyandu sudah terbilang cukup tinggi. Ditunjukan pada saat pelaksanaan kegiatan Posyandu kemauan

masyarakat untuk hadir cukup tinggi, dilihat dari masyarakat yang hadir cukup ramai.

3) Partisipasi Materi

Partisipasi dalam bentuk materi ini berisi mengenai partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi yang berguna dalam rangka membantu keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan program, dengan pemberian sumbangan atau kontribusi berupa konsumsi, barang, alat maupun uang. Dalam pelaksanaan suatu program, partisipasi masyarakat dalam bentuk materi ini dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam rangka mengembangkan hasil dari kegiatan suatu program tersebut. Dengan ikut sertanya masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam bentuk materi dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan program.

Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Kader Program Posyandu Ibu Nurjanah pada tanggal 1 Februari 2024, terkait partisipasi masyarakat dalam bentuk materi: “Secara materi tidak ada iuran wajib neng untuk Posyandu, paling kita ada iuran seikhlasnya untuk tambahan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk balita yang hadir”

Hal ini juga disampaikan oleh Melly Hastuti selaku Kader Posyandu pada tanggal 1 Februari 2024, menyebutkan bahwa:

Dalam bentuk materi masyarakat engga ada kewajiban pembayaran apa-apa, paling peminjaman tempat aja mungkin, jadi biasanya kita kegiatannya di halaman masjid kan, kadang di halaman masjid nih misalkan lagi dipakai untuk kegiatan lain jadi ada lah warga yang punya halaman rumah luas mau memberikan kontribusi untuk meminjamkan halamannya untuk dijadiin tempat kegiatan Posyandu.

Pernyataan ini juga sejalan, dengan pernyataan Ibu Niah selaku Kader Posyandu pada tanggal 26 Januari 2024, menyebutkan bahwa:

Program Posyandu gratis gak ada pemungutan biaya, jadi masyarakat gak berpartisipasi dalam bentuk materi yang diwajibkan, kadang mungkin ada keikhlasan dari salah satu ibu balita gitu memberikan sumbangan susu misalnya atau kacang hijau, itu gak setiap pelaksanaan neng, kadang aja gitu.

Peneliti juga menanyakan kepada masyarakat yang mengikuti program Posyandu, untuk mengetahui pernyataan dari masyarakat terhadap partisipasi masyarakat sendiri dalam bentuk materi. Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Ibu Risa Mariana S. pada tanggal 1 Februari 2024, terkait partisipasi dalam bentuk pikiran: “Kontribusi dalam hal materi wajib tidak ada, paling iuran seikhlasnya untuk menu PMT aja mungkin”.

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh Ibu Sri Yani pada tanggal 1 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Engga ada si mbagatis ga dipungut apa-apa, adanya iuran sukarela untuk makanan PMT aja itu juga ga dipaksa”.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Irma Fitriyani pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Iuran seikhlasnya paling buat makanan balita, itu juga gak ada minimalnya berapa, kadang juga aku lupa bawa uang jadi ya gapapa juga kalo gak ngasih”.

Adapun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti saat pelaksanaan program Posyandu, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bentuk materi, hanya sebatas pemberian iuran seikhlasnya untuk menu PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pada balita, di mana sifatnya tidak memaksakan masyarakat, jadi tidak ada kewajiban untuk masyarakat harus berkontribusi.



Gambar 4. 2 Pemberian Iuran Untuk Menu PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Balita

Sumber: Dokumen Peneliti

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti yang ditinjau dari segi partisipasi masyarakat dalam bentuk materi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara pada program Posyandu menunjukkan terdapat pemberian kontribusi uang dalam bentuk iuran seikhlasnya untuk menu PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pada balita, di mana sifatnya tidak memaksakan masyarakat. Selain itu, terdapat pemberian kontribusi dari sebagian masyarakat dengan pemberian tambahan makanan untuk menu PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk balita, dan kontribusi pemberian peminjaman tempat untuk pelaksanaan Posyandu, di mana segala kontribusi ini menjadi pendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan Posyandu, dengan harapan tercapainya keberhasilan program Posyandu.

b. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Program Jumantik

Pada dasarnya, Jumantik merupakan upaya untuk mengawasi lingkungan guna mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, dengan tujuan dapat meningkatkan Kesehatan masyarakat di wilayah sekitar. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang secara umum dapat diberikan oleh masyarakat dalam program Jumantik, di mana terbagi menjadi tiga bentuk partisipasi masyarakat, yakni partisipasi dalam bentuk Pikiran, Keterlibatan dan yang terakhir dalam bentuk Materi. Ketiga indikator tersebut dapat dilihat dari hasil penjabaran penelitian sebagai berikut:

1) Partisipasi Pikiran

Partisipasi dalam bentuk pikiran ini berisi mengenai partisipasi masyarakat dalam memberikan sebuah pembahasan berupa ide atau gagasan, saran-saran, pendapat atau buah pikiran yang membangun, baik dalam penyusunan program ataupun untuk mendukung jalannya pelaksanaan program. Selain itu, memberikan pengalaman serta pengetahuan, untuk mengembangkan kegiatan yang diadakan dalam program Jumantik. Demi tercapainya suatu keberhasilan program, masyarakat harus ikut berpartisipasi secara langsung pada setiap prosesnya, salah satunya berpartisipasi dalam memberikan atau menuangkan ide-ide pikiran mereka.

a) Partisipasi dalam bentuk pikiran masyarakat sebagai kader Jumantik

Pada bagian ini berisi mengenai partisipasi masyarakat sebagai kader dalam bentuk pikiran, dengan memberikan sebuah ide, gagasan, saran, kritik, pendapat ataupun buah pikiran yang membangun baik dalam penyusunan kegiatan program Jumantik, pelaksanaan kegiatan Jumantik dan evaluasi program Jumantik.

Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Kader Program Jumantik Ibu Hasanah pada tanggal 26 Januari 2024, terkait

partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran: “Biasanya saya sebagai kader menyampaikan pendapat atau saran perbaikan pada saat evaluasi setelah kegiatan, setelah selesai kegiatan pengecekan jentik masing-masing kita kumpul kader sama koordinator untuk evaluasi hasil pengecekan seperti apa hasilnya”.

Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Ibu Lilis selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 26 Januari 2024, menyebutkan bahwa: “Kalo saya menyampaikan saran, pendapat ataupun kritik dari masyarakat itu saat pelaksanaan Grebek PSN, saat kegiatan Gerebek PSN itu kan dilaksanakan bersama pihak Kelurahan dan Puskesmas juga jadi sekaligus evaluasi juga”.

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh Ibu Maryanti selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Saya selalu tampung sekaligus menyampaikan juga ke pihak Kelurahan saran dari masyarakat seperti apa, kalo ada permasalahan juga saya sampein ke Kelurahan biar dicari solusinya gimana”.

Dari hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan kader program Jumantik bahwa terdapat partisipasi pikiran yang diberikan seperti pemberian pendapat ataupun saran pada saat evaluasi setelah kegiatan pengecekan jentik bersama kader dan koordinator program Jumantik di setiap RW dan menyampaikan saran ataupun kritik dari masyarakat terhadap program Jumantik kepada pihak Kelurahan dan Puskesmas. Kader sebagai promotor program sekaligus masyarakat ikut memberikan partisipasi dalam bentuk pikiran sebagai suatu acuan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan Jumantik.

b) Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran pada program Jumantik

Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Kader Program Jumantik Ibu Hasanah pada tanggal 26 Januari 2024, terkait partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran:

Pernah ada masyarakat yang memberikan ide untuk pelaksanaan jumantik, ada salah satu masyarakat karena dia bekerja tentunya jarang dirumah, jadi kadang saat jadwal saya pengecekan tidak bisa terpantau, karena itu saya dapat saran dari masyarakat sebagai bukti masyarakat melakukan PSN mandiri, harus melaporkan ke saya melalui foto bak mandi yang sudah di cek.

Pernyataan ini juga sejalan, dengan pernyataan Ibu Maryanti selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa:

Kalo saran sempat ada neng, saya pernah dapat saran dari salah satu masyarakat, kalo misalnya di penampungan luar ada jentik dibeliin ikan cupang, cupang kan memakan nyamuk dan udah dicoba terbukti di RT mengurangi jentik, udah si paling itu aja neng, mungkin emang gak semua masyarakat mau memberikan saran.

Pernyataan ini tidak sejalan dengan pernyataan Ibu Lilis selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 26 Januari 2024, menyebutkan bahwa: “Kalo saya saat ini belum pernah neng dapat saran dari masyarakat, tapi sampai saat ini masyarakat selalu terima saja arahan dari saya selaku kader”.

Peneliti juga menanyakan kepada masyarakat di lingkungan RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara, untuk mengetahui pernyataan dari masyarakat terhadap partisipasi masyarakat sendiri dalam bentuk pikiran pada program Jumantik. Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Ibu Jarwati selaku masyarakat pada tanggal 2 Februari 2024, terkait partisipasi dalam bentuk pikiran: “Kalo saya belum pernah berpartisipasi, rumah saya juga

tidak di cek mba, karena dirumah saya pake bak plastik jadi ga nampung air lama-lama, mungkin karena kader sudah tau jadi nggak pernah mengecek”.

Pernyataan lain dari Ibu Nila selaku masyarakat pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Saya ikut serta kegiatan aja si mba, kalo misalnya ada keliling kader ya saya izinkan, saya persilahkan untuk mengecek rumah saya, tapi kalo memberikan ide atau pendapat belum pernah saya, belum pernah diminta juga untuk saran atau kritik”.

Pernyataan ini tidak sejalan, dengan pernyataan Ibu Elva selaku masyarakat pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa:

Saya pernah memberikan pendapat paling mba, misalkan setelah kader keliling pengecekan dan menemukan jentik di beberapa titik biasanya akan dishare di grup RT, saya membantu memberikan saran pendapat aja buat yang lain untuk selalu melakukan PSN mandiri juga, dengan ini dapat mencegah adanya sarang nyamuk dan membantu kerja kader juga. Cuma disayangkan belum pernah ditanyaian sama kader secara langsung, jadi mungkin ga semua masyarakat berani ngomong.

Dari uraian diatas menunjukan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran pada pelaksanaan program Jumantik. Jika dilihat dari pernyataan diatas, hanya sedikit masyarakat yang memberikan saran kepada kader, masyarakat merasa belum pernah dipersilahkan untuk memberikan pendapat atau ide ataupun saran, disimpulkan bahwa belum adanya kesempatan serta wadah yang dapat menampung ide maupun aspirasi dari masyarakat. Kesimpulan dari sebagian kader juga menyatakan bahwa sudah ada masyarakat yang memberikan partisipasi dalam bentuk pikiran, namun masih terbilang sangat sedikit, belum banyak masyarakat menunjukan kemauan memberikan pendapat guna keberhasilan program Jumantik ini.

2) Partisipasi Keterlibatan

Dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan program maka diperlukan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tentunya berguna untuk mencapai tujuan bersama, dengan terlibatnya masyarakat dapat menghasilkan rencana yang sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Bentuk partisipasi ini dapat berupa keikutsertaan masyarakat pada pelaksanaan program Jumantik, ataupun pemberian sumbangan tenaga masyarakat untuk bekerja sama menjadi promotor program Jumantik, di mana dapat menunjang suatu kegiatan sehingga dapat terealisasi secara maksimal, demi tercapainya tujuan bersama yakni mensejahterakan masyarakat.

a) Keterlibatan masyarakat untuk menjadi kader Jumantik

Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Kembangan Utara Bapak M.Ridwan pada tanggal 26 Januari 2024, terkait partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat untuk menjadi kader program Jumantik:

Keterlibatan masyarakat untuk mau menjadi kader Posyandu maupun Jumantik sudah cukup banyak ibu-ibu yang tertarik, namun memang kita dibataskan oleh jumlah kuota yang ada di masing-masing wilayah. Tetapi terdapat dua wilayah di RW 9 dan RW 11 disana wilayah komplek, Di wilayah komplek kami kesulitan untuk mencari masyarakat yang mau terlibat menjadi kader Jumantik ataupun Posyandu. Karena masyarakat menilai apa sih kerjaan kader, dan selalu berpikiran apa sih yang saya dapat. Karena kan kader itu memang kerja sosial, tidak ada gaji paling dapat apresiasi sedikit dari kelurahan.

Peneliti juga menanyakan kepada kader program Jumantik, untuk mengetahui pernyataan langsung dari kader, bahwa apa yang melatarbelakangi mereka mau atau bersedia terlibat menjadi kader pada program Jumantik di lingkungan RW.01 dan RW.06 kelurahan Kembangan Utara, dimana pekerjaan kader ini merupakan

pekerjaan sosial yang tidak mendapatkan upah, hanya mendapatkan sedikit apresiasi dari Kelurahan.

Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Ibu Hasanah selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 26 Januari 2024, menyebutkan bahwa: “Saya suka karena jadi punya banyak teman, bisa bersosialisasi, dan senang aktif berkegiatan”.

Pernyataan yang sama dari Ibu Lilis selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 26 Januari 2024, menyebutkan bahwa: “Saya si senang aja bisa bersosialisasi, menambah teman, menambah pengetahuan saya juga neng. Engga melihat dapet upah atau engga, dibawa senang aja ketemu ibu-ibu lain”.

Pernyataan ini juga sejalan, dengan pernyataan Ibu Maryanti selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Saya kan hanya ibu rumah tangga, ikut jadi kader ini untuk ngisi waktu luang saya, cari hiburan juga neng, seru ketemu banyak teman, menambah wawasan juga karena sering bertukar pengalaman, pendapat”.

Berdasarkan hasil studi dokumen peneliti, terdapat 92 kader Jumantik di lingkungan Kelurahan Kembangan Utara. Kader Jumantik lebih sedikit disebabkan dari ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang hanya diberikan kuota sebanyak 1 (satu) kader saja pada setiap RT (Rukun Tetangga). Seharusnya terdapat 117 kader Jumantik, karena menyesuaikan jumlah RT (Rukun Tetangga) di Kelurahan Kembangan Utara. Namun, terdapat dua RW yang tidak memiliki kader yaitu RW 09 yang terdiri dari 18 RT dan RW 011 yang terdiri dari 7 RT, hal ini disebabkan wilayah kompleks sehingga sulit untuk menemukan masyarakat yang bersedia menjadi kader.

Dari hasil wawancara dan studi dokumen peneliti dapat disimpulkan bahwa cukup banyak masyarakat yang tertarik untuk

terlibat menjadi kader, walaupun kader merupakan pekerja sosial yang tidak mendapatkan upah. Tetapi ibu-ibu tetap bersedia untuk terlibat menjadi kader dalam program Jumantik, mereka mengambil manfaat dari keterlibatannya untuk mengisi waktu luang, mencari hiburan dapat bertemu ibu-ibu lain, menambah teman, dapat bersosialisasi dengan orang banyak sehingga dapat menambah pengetahuan, wawasan karena sering bertukar pendapat ataupun pengalaman, sehingga dengan ini tidak diberikannya upah bukan menjadi alasan mereka untuk tidak terlibat, ibu-ibu kader tetap bersedia terlibat.

b) Keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan program Jumantik

Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Kembangan Utara Bapak M.Ridwan pada tanggal 26 Januari 2024, terkait partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat pada program Jumantik:

Kalo untuk masyarakat yang mau mengikuti program, mau terlibat dalam program Posyandu dan Jumantik saat ini juga cukup tinggi walaupun masih ada yang belum tergerak untuk terlibat, tapi kalo kita pihak Kelurahan nilai sudah 80% lah masyarakat yang mau ikut serta.

Pernyataan lain dari Ibu Hasanah selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 26 Januari 2024, menyebutkan bahwa: “Sebagian ada yang mau terlibat dan ada yang engga, masih setengah setengah lah. Kadang nunggu ada keluarga yang kena DBD baru mau ikut terlibat”.

Pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan Ibu Lilis selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 26 Januari 2024, menyebutkan bahwa:

Engga semua mau didatengin mau ikut terlibat kegiatan Jumantik untuk di cek rumahnya, Kadang ada aja yang

rumahnya masih tertutup diketok ga buka mungkin masih tidur, atau kerja atau emang lagi keluar rumah atau gimana, tapi saya titip pesan untuk PSN mandiri, saya selalu ingatin untuk PSN mandiri.

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh Ibu Maryanti selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Tidak semua masyarakat mau ikut serta terlibat, ada yang mau ada juga yang engga, Kadang kalo saya lagi jadwal pengecekan PSN keliling, ada yang mau nerima buka pintu, tapi ada juga yang liat kita mau periksa langsung kunci pintu”.

Adapun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti saat mengikuti Gerak PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) pada lingkungan Kelurahan Kembangan Utara, menunjukkan banyak masyarakat yang tidak membukakan pintu untuk kader, saat melakukan pengecekan dari rumah ke rumah. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini, salah satu bukti bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menutup pintu untuk kader, sehingga kader hanya dapat memeriksa bagian depan rumah masyarakat saja.



Gambar 4. 3 Masyarakat yang menutup pintu saat kegiatan pengecekan PSN program Jumantik
Sumber: Dokumen Peneliti

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan pada pelaksanaan program Jumantik masih terbilang rendah. Ditunjukkan pada saat pelaksanaan kegiatan Jumantik masih banyak masyarakat yang enggan untuk terlibat pada program Jumantik, terlihat tidak sedikit pintu rumah masyarakat yang tertutup saat pelaksanaan kegiatan Jumantik berlangsung sehingga kader tidak dapat melakukan pengecekan jentik.

3) Partisipasi Materi

Partisipasi dalam bentuk materi ini berisi mengenai partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi yang berguna dalam rangka membantu keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan program, dengan pemberian sumbangan atau kontribusi berupa konsumsi, barang, alat maupun uang. Dalam pelaksanaan suatu program, partisipasi masyarakat dalam bentuk materi ini dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam rangka mengembangkan hasil dari kegiatan suatu program tersebut. Dengan ikut sertanya masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam bentuk materi dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan program.

Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Kader Program Jumantik Ibu Hasanah pada tanggal 26 Januari 2024, terkait partisipasi masyarakat dalam bentuk materi: “Kalo dalam bentuk materi engga ada kontribusi apa-apa dari masyarakat untuk program Jumantik, karena yang dibutuhkan kader saat pengecekan paling kan kaya senter misalnya, itu udah di kasih sama Kelurahan”.

Pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan Ibu Lilis selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 26 Januari 2024, menyebutkan

bahwa: “Engga ada kontribusi dari warga kalo bentuk materi, pokoknya warga mah tinggal bersedia aja ikut program Jumantik”.

Pernyataan yang sama juga diberikan Ibu Maryanti selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Engga ada pembayaran iuran neng untuk Jumantik, kegiatannya gratis alat, atau dana anggaran dari kelurahan, jadi masyarakat engga ada pemberian materi”.

Peneliti juga menanyakan kepada masyarakat di lingkungan RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara, untuk mengetahui pernyataan dari masyarakat terhadap partisipasi masyarakat sendiri dalam bentuk materi. Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Ibu Elva selaku masyarakat pada tanggal 2 Februari 2024, terkait partisipasi dalam bentuk materi: “Kalo secara materi engga ada, engga ada iuran untuk pembelian alat atau apa gitu engga ada sih, mungkin memang sudah dapet anggaran dari pemerintah kali ya”.

Pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan Ibu Jarwati selaku masyarakat pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Engga ada iuran apa-apa mba, saya ga pernah dimintai iuran soal Jumantik sama RT ataupun kader”.

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Ibu Nila selaku masyarakat pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Engga ada pembayaran apa-apa, gratis gada iuran sama sekali”.

Dari hasil wawancara peneliti yang meninjau partisipasi masyarakat dalam bentuk materi pada program Jumantik di lingkungan Kelurahan Kembangan Utara, dinilai masyarakat tidak memiliki kontribusi dalam bentuk materi baik dalam bentuk pemberian uang ataupun barang. Kegiatan pada program ini hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah saja.

c. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat

1) Faktor Pendukung dalam Program Posyandu

Untuk mengetahui faktor pendukung pelaksanaan kegiatan program Posyandu, peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang memiliki anak balita dan kader Posyandu. Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Ibu Risa Mariana S. pada tanggal 1 Februari 2024, menyatakan bahwa: “Kader aktif, baik, ramah, akrab sama ibu-ibu sama anak balitanya juga. Selalu ngasih informasi kalo mau ada kegiatan Posyandu, diingatkan juga misalnya pas hari pelaksanaan. Di informasiin di mushola kadang juga udah dikasih tau mulut ke mulut gitu”.

Pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan Ibu Sri Yani pada tanggal 1 Februari 2024, menyebutkan bahwa:

Kadernya sangat aktif, ngasih tau jadwal posyandu ga cuma dari musholla aja, di grup RT juga, kadang juga woro-woro ke ibu-ibu yang lagi pada duduk-duduk sore, kasih sosialisasi juga ke ibu-ibu untuk kesehatan anak, kalo berat anak saya rendah biasanya dikasih saran juga ramah pokoknya.

Peneliti juga menanyakan kepada kader posyandu terkait upaya kader untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program Posyandu. Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Ibu Nurjanah selaku Kader Posyandu pada tanggal 1 Februari 2024, menyebutkan bahwa:

Sudah ngasih informasi kalo mau pelaksanaan kegiatan Posyandu dari satu hari sebelumnya, kita infoin di Grup RT, kita woro-woro di mushola-mushola, pasang di status WA tiap kader, kan udah ada sosmed ya neng sekarang mah, pas hari kegiatan juga diingetin lagi neng diinfoin pake speaker mushola dan untuk sosialisasi kita selalu menghimbau untuk selalu hadir menjelaskan juga kalo Posyandu sangat penting.

Pernyataan ini juga sejalan, dengan pernyataan Ibu Melly Hastuti selaku Kader Posyandu pada tanggal 1 Februari 2024, menyebutkan bahwa:

Sudah ada upaya seperti dilakukan penyuluhan, ada himbauan sebelum kegiatan Posyandu sebelumnya kita sudah woro-woro di grup warga. Apalagi kalo ada vitamin kita woro-woro terus soalnya kalo diluar bidan lumayan ya bisa 150rb kalo di Posyandu kan gratis. Sebelum mulai pun pagi diumumkan lagi di mushola. Tapi tetep kembali ke orang tua balita masing-masing bersedia hadir atau engga.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang memiliki anak balita dan juga kader program Posyandu dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan program Posyandu yaitu keaktifan kader Posyandu. Terlihat dari upaya-upaya yang telah kader lakukan dalam memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, dan didukung oleh pernyataan masyarakat yang menilai kader Posyandu ramah dalam memberikan pelayanan, aktif dalam memberikan informasi dan aktif memberikan sosialisasi serta menghimbau masyarakat.

2) Faktor Pendukung dalam Program Jumantik

Untuk mengetahui faktor pendukung pelaksanaan kegiatan program Jumantik, peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat dan kader Jumantik. Faktor pendukung pertama adalah kelurahan telah memberikan fasilitas penunjang kegiatan program Jumantik, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan dari wawancara kepada Kader Program Jumantik Ibu Hasanah pada tanggal 26 Januari 2024, terkait fasilitas pada program Jumantik: “Kelurahan sudah memfasilitasi alat-alat penunjang kegiatan untuk pengecekan jentik seperti senter gitu sudah pasti dapet”.

Pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan Ibu Maryanti selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Dari kelurahan sudah ngedukung memfasilitasi alat-alat untuk kegiatan, kadang dari RT juga misalnya di

penampungan luar ada jentik, difasilitasi sama RT untuk kita beliin ikan cupang, sebagai upaya pemberantasan sarang nyamuk”.

Berdasarkan hasil wawancara kader program Jumantik dapat disimpulkan bahwa salah faktor pendukung dalam kegiatan program Jumantik yaitu fasilitas yang lengkap untuk menunjang kegiatan sehingga dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Faktor pendukung lain pada pelaksanaan kegiatan program Jumantik adalah keaktifan kader Jumantik. Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Ibu Elva selaku masyarakat pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Sejauh ini kader aktif, ngasih informasi mengenai PSN, atau ada kegiatan pengecekan, Grebek PSN pasti selalu di informasikan di grup, walaupun kadang ada yang miss karena kader setau saya cuma satu disini sedangkan warganya banyak”.

Pernyataan ini juga sejalan, dengan pernyataan Ibu Jarwati selaku masyarakat pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Kader aktif, dilihat di grup RT selalu memberikan informasi juga ke warga tentang Jumantik, kalo mau keliling juga diinform”.

Peneliti juga menanyakan kepada kader Jumantik terkait upaya kader untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program Jumantik. Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Ibu Lilis selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 26 Januari 2024, menyebutkan bahwa:

Masyarakat sudah di informasikan mengenai jadwal pengecekan PSN setiap selasa dan jumat, di grup RT juga selalu diingatkan, apalagi kalo sebagian jadwal Grebek PSN itu kelilingnya pake toa juga sambil ngasih informasi-informasi ke warga, dan untuk sosialisasi saya selalu menghimbau, melalui grup RT untuk memeriksa jentik mandiri, Mengajarkan warga PSN mandiri cara memantau jentik saya sudah sampaikan dan sosialisasikan.

Pernyataan ini juga sejalan, dengan pernyataan Ibu Maryanti selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Saya sebagai kader upayanya ya selalu menghimbau, mensosialisasi melalui setiap grup RT untuk memeriksa jentik secara mandiri juga. Mengajarkan warga untuk PSN mandiri dan cara memantau jentik”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat dan juga kader program Jumantik dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan program Jumantik yaitu keaktifan kader Jumantik. Terlihat dari upaya-upaya yang telah kader lakukan dengan aktif memberikan informasi, aktif memberikan sosialisasi seperti mengajarkan warga untuk memeriksa jentik secara mandiri, dan selalu rajin memberikan himbauan kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan masyarakat yang menilai kader Jumantik aktif dalam memberikan informasi kegiatan baik melalui grup *WhatsApp* ataupun secara langsung, aktif dalam memberikan informasi dan aktif memberikan sosialisasi serta menghimbau masyarakat mengenai pengecekan jentik.

d. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

1) Faktor Penghambat dalam Program Posyandu

Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kegiatan program Posyandu, peneliti melakukan wawancara kepada kader posyandu dan juga masyarakat serta melakukan observasi saat pelaksanaan kegiatan Posyandu. Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Ibu Nurjanah selaku Kader Posyandu pada tanggal 1 Februari 2024, menyebutkan bahwa:

Kendalanya kita tidak punya POS, belum ada tempat yang layak buat kegiatan posyandu, kita melakukan kegiatannya ya kaya gini di halaman masjid, kendalanya harus bawa-bawa meja, bangku, alat-alat ke masjid, di lingkungan masjid juga banyak mobil motor lewat kadang kurang nyaman juga jadinya.

Pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan Ibu Niah, selaku Kader Posyandu pada tanggal 26 Januari 2024, menyebutkan bahwa: “Kalo kendala fasilitas masih kurang, kaya bangku buat ibu-ibu yang nunggu antrian belum ada, kalo ada kan jadi ga kasian sambil gendong-gendong, lebih nyaman kan ya neng kalo ada bangku mah, kalo ga nyaman kan orang juga males datengnya”.

Peneliti juga menanyakan kepada masyarakat yang mengikuti program posyandu, untuk mengetahui pernyataan dari masyarakat terhadap fasilitas yang ada pada saat pelaksanaan kegiatan Posyandu. Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Ibu Risa Mariana S. pada tanggal 1 Februari 2024, menyatakan bahwa:

Menurut saya, untuk fasilitas memang masih kurang memadai, bangku harusnya disediakan untuk para ibu-ibu yang menunggu antrian, kadang memang yang membuat malas dateng ke Posyandu ya itu karena gada tempat duduk untuk nunggu, sambil gendong anak cape juga ya, kalo ada tempat duduk kan lebih nyaman nunggunya.

Pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan Ibu Irma Fitriyani pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Kalo fasilitasnya seperti biasa Posyandu umunya aja si, ya ada penimbangan anak, pengukur tinggi anak, pemberian imunisasi, kekurangannya tempat mungkin banyak motor lewat-lewat namanya depan mushola kan jadi suka ribet aja mana banyak anak kecil”.

Adapun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti saat pelaksanaan kegiatan program Posyandu, menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan memang dilakukan di halaman masjid, di mana terlihat fasilitas kurang memadai tidak ada tempat tunggu antre untuk ibu-ibu yang membawa balita. Selama kegiatan juga tidak jarang kendaraan berlalu-lalang baik motor maupun mobil, tentunya sangat membahayakan dimana banyaknya balita yang menunggu antrean.



Gambar 4. 4 Pelaksanaan Kegiatan Posyandu dilakukan di halaman Masjid

Sumber: Dokumen Peneliti

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti menunjukkan bahwa fasilitas pada program Posyandu belum memadai, kurang layak nya tempat pelaksanaan kegiatan di mana dilaksanakan di halaman masjid yang banyak dilalui kendaraan roda dua ataupun roda empat tentu dapat membahayakan para balita, selain itu belum adanya fasilitas bangku untuk menunggu. Hal ini menjadi suatu kendala sehingga masyarakat merasa kurang nyaman dan kurang aman saat hadir pada kegiatan Posyandu, dengan ini dapat berpengaruh terhadap kemauan masyarakat untuk hadir dalam pelaksanaan kegiatan program.

2) Faktor Penghambat dalam Program Jumantik

Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kegiatan program Jumantik, peneliti melakukan wawancara kepada kader Jumantik. Berdasarkan informasi dari wawancara kepada Ibu Lilis selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 26 Januari 2024, menyebutkan bahwa:

Kendala nya kekurangan orang aja, sudah minta tambah tenaga kerja contohnya di RT 5 RT 7 itu banyak bangetarganya. Tapi kata pihak Kelurahan dari atasan kelurahan belum bisa

menambah kader. Jadi ya kekurangan tenaga kerja hanya 1 orang dalam 1 RT, sedangkan warganya banyak nantinya tidak merata pengecekan dalam 1 bulan. Jumlah warga atau keluarga banyak tapi tenaga kerja yang melayani kurang.

Pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan Ibu Maryanti selaku Kader Program Jumantik pada tanggal 2 Februari 2024, menyebutkan bahwa: “Kendalanya kalo dari saya mungkin karena banyaknya rumah warga tapi saya hanya sendiri kadernya. Kalo bisa 1 RT tambah 1 orang lagi gitu, jadi ga terlalu keteter jadi bisa dibagi bagian depan saya satunya bagian belakang sana gitu”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kader program Jumantik dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan kegiatan program yaitu kurangnya jumlah kader sebagai promotor kegiatan, melihat jumlah kader setiap RT hanya 1 (satu) sedangkan tugas kader melakukan pengecekan jentik di seluruh rumah warga dalam 1 (satu) RT. Dengan ini kegiatan tidak dilakukan secara maksimal karena kader keteteran dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak dapat melakukan pengecekan dengan merata ke semua rumah warga, hal ini dapat menjadi salah satu faktor masyarakat tidak ikut serta pada kegiatan pengecekan jentik dengan ini kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik, dan tidak mendapatkan hasil kebermanfaatan yang maksimal.

B. Pembahasan

Pada bagian ini peneliti memaparkan analisis hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Dalam asas pelayanan publik dijelaskan bahwa setiap penyelenggaraan program atau kegiatan pelayanan publik harus memiliki keterlibatan masyarakat didalamnya. Di mana semakin tinggi keterlibatan masyarakat di dalam setiap program yang diselenggarakan maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan program yang akan dicapai (Selvia & Jerry, 2020).

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan mental, pikiran, moral atau perasaan, di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan, serta ikut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi tidak hanya berdasarkan keterlibatan secara fisik saja dalam pekerjaannya, melainkan menyangkut keterlibatan seluruh diri seseorang sehingga akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok (Keith Davis dalam Hendro Letsoin, 2015).

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Program Posyandu

Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam program Posyandu, maka peneliti melakukan identifikasi bentuk partisipasi dalam tiga indikator yaitu, partisipasi pikiran, partisipasi keterlibatan dan partisipasi materi.

a. Partisipasi Pikiran

Dalam menyelenggarakan suatu program pemberdayaan masyarakat, perlu adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran. Di mana masyarakat sebagai objek dalam program turut memberikan sebuah pembahasan yang berupa ide atau gagasan, saran-saran, maupun pendapat atau buah pikiran yang membangun, baik dalam penyusunan program ataupun untuk mendukung jalannya pelaksanaan program. Dalam mewujudkannya masyarakat dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan, untuk mengembangkan kegiatan yang yang diadakan dalam

program Posyandu. Demi tercapainya suatu keberhasilan program, masyarakat harus ikut berpartisipasi secara langsung pada setiap prosesnya, salah satunya partisipasi dalam memberikan atau menuangkan ide-ide pikiran mereka.

1) Partisipasi dalam bentuk pikiran masyarakat sebagai kader Posyandu

Berdasarkan penyajian data diatas terdapat partisipasi dalam bentuk pikiran yang diberikan kader program Posyandu di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara. Ditunjukkan dari pernyataan kader Posyandu bahwa mereka dapat memberikan pendapat pada saat evaluasi program Posyandu bersama pihak puskesmas dan menyampaikan saran yang telah masyarakat berikan pada saat pelaksanaan kegiatan Posyandu kepada pihak kelurahan. Pada dasarnya kader sebagai promotor program sekaligus masyarakat ikut memberikan partisipasi dalam bentuk pikiran sebagai suatu acuan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan Posyandu.

2) Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran pada program Posyandu

Berdasarkan penyajian data diatas masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran pada program Posyandu di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara. Ditunjukkan dari pernyataan masyarakat bahwa masyarakat masih malu atau enggan untuk memberikan pendapat yang membangun guna perbaikan kegiatan program Posyandu. Selain itu belum adanya kader posyandu yang meminta masyarakat untuk memberikan saran dan kritik dalam pelaksanaan program Posyandu, sehingga masyarakat juga merasa belum ada wadah yang dapat mereka manfaatkan untuk memberikan ide, pendapat, saran ataupun kritik yang membangun untuk kegiatan program Posyandu.

Dari uraian diatas menunjukan kenyataan ini belum sejalan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 Tahun 2003 mengenai pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, yang menjelaskan asas-asas pelayanan publik, di mana salah satu asas pelayanan publik yakni partisipasi. Dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Dengan memberikan wadah untuk masyarakat memberikan aspirasi, pendapat mereka, ataupun kritik dan saran perbaikan program Posyandu, tentunya akan berguna sebagai acuan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan program.

b. Partisipasi Keterlibatan

Dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat, tentu diperlukannya keterlibatan masyarakat. Di mana keberhasilan program salah satunya dinilai dari seberapa banyak masyarakat yang terlibat pada program tersebut. Semakin banyak masyarakat yang terlibat berarti semakin banyak masyarakat yang terberdayakan. Bentuk partisipasi ini dapat berupa kehadiran, keikutsertaan, ataupun pemberian sumbangan tenaga yang dapat menunjang suatu kegiatan pada program Posyandu. Dengan adanya keterlibatan penuh masyarakat, maka program dapat terealisasi secara maksimal, dan tercapainya tujuan bersama yakni mensejahterakan masyarakat.

1) Keterlibatan masyarakat untuk menjadi kader Posyandu

Berdasarkan penyajian data diatas sudah cukup banyak masyarakat yang tertarik untuk terlibat menjadi kader Posyandu. Dari hasil penelitian peneliti menunjukan terdapat 167 kader Posyandu di lingkungan Kelurahan Kembangan Utara. Jumlah kader pada Posyandu terbilang sudah cukup banyak, sehingga tidak kekurangan tenaga kerja atau sumber daya manusia dalam mempromotor program

Posyandu, dengan ini kegiatan dapat berjalan dengan baik. Masyarakat menunjukkan rasa simpati yang tinggi pada lingkungan sekitar, sehingga bersedia untuk terlibat menjadi kader program Posyandu walaupun kader merupakan pekerja sosial yang tidak mendapatkan upah.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa partisipasi keterlibatan masyarakat sebagai kader program Posyandu menunjukkan keterlibatan yang tinggi. Kenyataan ini sudah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dimana pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dengan bentuk menjalin kemitraan, dalam hal ini dimaksudkan masyarakat dijadikan kader-kader kesehatan yang berguna untuk bekerja sama mencapai keberhasilan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2) Keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan program Posyandu

Berdasarkan penyajian data diatas partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan pada pelaksanaan program Posyandu di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara sudah terbilang cukup tinggi. Ditunjukan pada saat pelaksanaan kegiatan Posyandu kemauan masyarakat untuk hadir cukup tinggi, terlihat dari masyarakat yang hadir cukup ramai.

Mengacu pada teori Selvia & Jerry (2020), di mana menyebutkan bahwa semakin tinggi keterlibatan masyarakat di dalam setiap program yang diselenggarakan maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan program yang akan dicapai. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kenyataan menunjukkan bahwa tingginya bentuk keterlibatan pada program Posyandu ini sudah sejalan dengan teori tersebut.

c. Partisipasi Materi

Partisipasi dalam bentuk materi ini merupakan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian sumbangan atau kontribusi berupa konsumsi, barang, alat maupun uang, yang berguna untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan program. Dalam pelaksanaan suatu program, partisipasi materi ini dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan hasil dari kegiatan program tersebut. Mengacu pada teori Hamidjojo (dalam Choresyo dkk, 2017), menjelaskan bahwa partisipasi materi merupakan bentuk partisipasi yang berguna memperlancar usaha-usaha untuk pencapaian kebutuhan masyarakat dalam suatu kegiatan program.

Kenyataan dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di lingkungan Kelurahan Kembangan Utara sejalan dengan teori tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk materi, seperti pemberian kontribusi uang dalam bentuk iuran seikhlasnya untuk menu PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pada balita, di mana sifatnya tidak memaksakan masyarakat. Selain itu, terdapat pemberian kontribusi dari sebagian masyarakat dengan pemberian tambahan makanan untuk menu PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk balita, dan kontribusi pemberian peminjaman tempat untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu. Partisipasi dalam bentuk materi yang diberikan masyarakat ini dapat memperlancar dan mendukung kegiatan Posyandu sehingga tercapainya tujuan program.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Program Jumantik

Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam program Jumantik, maka peneliti melakukan identifikasi bentuk partisipasi dalam tiga indikator yaitu, partisipasi pikiran, partisipasi keterlibatan dan partisipasi materi.

a. Partisipasi Pikiran

Dalam menyelenggarakan suatu program pemberdayaan masyarakat, perlu adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran. Di mana masyarakat sebagai objek dalam program turut memberikan sebuah pembahasan yang berupa ide atau gagasan, saran-saran, maupun pendapat atau buah pikiran yang membangun, baik dalam penyusunan program ataupun untuk mendukung jalannya pelaksanaan program. Dalam mewujudkannya masyarakat dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan, untuk mengembangkan kegiatan yang diadakan dalam program Jumantik. Demi tercapainya suatu keberhasilan program, masyarakat harus ikut berpartisipasi secara langsung pada setiap prosesnya, salah satunya partisipasi dalam memberikan atau menuangkan ide-ide pikiran mereka.

1) Partisipasi dalam bentuk pikiran masyarakat sebagai kader Jumantik

Berdasarkan penyajian data diatas terdapat partisipasi dalam bentuk pikiran yang diberikan kader program Jumantik di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara. Ditunjukkan dari pernyataan kader terdapat partisipasi pikiran yang diberikan seperti pemberian pendapat ataupun saran pada saat evaluasi setelah kegiatan pengecekan jentik bersama kader dan koordinator program Jumantik di setiap RW dan menyampaikan saran ataupun kritik dari masyarakat terhadap program Jumantik kepada pihak Kelurahan dan Puskesmas. Kader sebagai promotor program sekaligus masyarakat ikut memberikan partisipasi dalam bentuk pikiran sebagai suatu acuan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan Jumantik.

2) Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran pada program Jumantik

Berdasarkan penyajian data diatas masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran pada program Jumantik di RW.01

dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara. Ditunjukan dari hasil penelitian bahwa hanya sedikit masyarakat yang memberikan saran kepada kader. Pernyataan dari kader menyatakan bahwa sudah ada masyarakat yang memberikan partisipasi dalam bentuk pikiran, namun masih terbilang sangat sedikit, belum banyak masyarakat menunjukan kemauan memberikan pendapat guna keberhasilan program Jumantik ini. Kemudian pernyataan dari masyarakat menunjukan masyarakat merasa belum pernah dipersilahkan untuk memberikan pendapat atau ide ataupun saran, belum adanya kesempatan serta wadah yang dapat menampung ide maupun aspirasi dari masyarakat.

Dari uraian diatas menunjukan kenyataan ini belum sejalan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 Tahun 2003 mengenai pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, yang menjelaskan asas-asas pelayanan publik, di mana salah satu asas pelayanan publik yakni partisipasi. Dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Dengan memberikan wadah untuk masyarakat memberikan aspirasi, pendapat mereka, ataupun kritik dan saran perbaikan program Jumantik, tentunya akan berguna sebagai acuan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan program Jumantik.

b. Partisipasi Keterlibatan

Dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat, tentu diperlukannya keterlibatan masyarakat. Dimana keberhasilan program salah satunya dinilai dari seberapa banyak masyarakat yang terlibat pada program tersebut. Semakin banyak masyarakat yang terlibat berarti semakin banyak masyarakat yang terberdayakan. Bentuk partisipasi ini dapat berupa kehadiran, keikutsertaan, ataupun pemberian sumbangan tenaga yang dapat

menunjang suatu kegiatan pada program Jumantik. Dengan adanya keterlibatan penuh masyarakat, maka program dapat terealisasi secara maksimal, dan tercapainya tujuan bersama yakni mensejahterakan masyarakat.

1) Keterlibatan masyarakat untuk menjadi kader Jumantik

Berdasarkan penyajian data diatas sudah cukup banyak masyarakat yang tertarik untuk terlibat menjadi kader Jumantik. Ditunjukan dari pernyataan kader bahwa mereka bersedia untuk terlibat menjadi kader, mereka mengambil manfaat dari keterlibatannya untuk mengisi waktu luang, mencari hiburan dapat bertemu ibu-ibu lain, menambah teman, dapat bersosialisasi dengan orang banyak sehingga dapat menambah pengetahuan, wawasan karena sering bertukar pendapat ataupun pengalaman sehingga tidak diberikannya upah bukan menjadi alasan mereka untuk tidak terlibat, ibu-ibu kader tetap bersedia terlibat.

Dari uraian diatas menunjukan bahwa partisipasi keterlibatan masyarakat sebagai kader program Jumantik menunjukan keterlibatan yang tinggi. Kenyataan ini sudah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dimana pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dengan bentuk menjalin kemitraan, dalam hal ini dimaksudkan masyarakat dijadikan kader-kader kesehatan yang berguna untuk bekerja sama mencapai keberhasilan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2) Keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan program Jumantik

Berdasarkan penyajian data diatas partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan pada pelaksanaan program Jumantik di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara masih terbilang rendah. Ditunjukan pada saat pelaksanaan kegiatan Jumantik masih banyak

masyarakat yang enggan untuk terlibat pada program Jumantik, terlihat tidak sedikit pintu rumah masyarakat yang tertutup saat pelaksanaan kegiatan Jumantik berlangsung sehingga kader tidak dapat melakukan pengecekan jentik.

Mengacu pada teori Selvia & Jerry (2020), di mana menyebutkan bahwa semakin tinggi keterlibatan masyarakat di dalam setiap program yang diselenggarakan maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan program yang akan dicapai. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kenyataan menunjukkan bahwa rendahnya bentuk keterlibatan masyarakat pada program Jumantik ini belum sejalan dengan teori tersebut.

c. Partisipasi Materi

Partisipasi dalam bentuk materi ini merupakan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian sumbangan atau kontribusi berupa konsumsi, barang, alat maupun uang, yang berguna untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan program. Dalam pelaksanaan suatu program, partisipasi materi ini dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan hasil dari kegiatan program tersebut. Mengacu pada teori Hamidjojo (dalam Choresyo dkk, 2017), menjelaskan bahwa partisipasi materi merupakan bentuk partisipasi yang berguna memperlancar usaha-usaha untuk pencapaian kebutuhan masyarakat dalam suatu kegiatan program.

Kenyataan dalam pelaksanaan kegiatan Jumantik di lingkungan Kelurahan Kembangan Utara belum sejalan dengan teori tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan Jumantik di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara menunjukkan tidak ada partisipasi masyarakat dalam bentuk materi. Masyarakat tidak memiliki kontribusi dalam bentuk materi baik dalam bentuk pemberian uang ataupun barang. Kegiatan pada program ini hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah saja.

3. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat

a. Faktor Pendukung dalam Program Posyandu

Berdasarkan penyajian data diatas faktor pendukung pada pelaksanaan kegiatan program Posyandu di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara yaitu keaktifan kader Posyandu. Terlihat dari upaya-upaya yang telah kader lakukan dalam memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, dan didukung oleh pernyataan masyarakat yang menilai kader Posyandu dinilai ramah dalam memberikan pelayanan, aktif dalam memberikan informasi dan aktif memberikan sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat.

b. Faktor Pendukung dalam Program Jumantik

Berdasarkan penyajian data diatas faktor pendukung pada pelaksanaan kegiatan program Jumantik di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara yaitu *pertama*, fasilitas yang lengkap untuk menunjang kegiatan Jumantik sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Kedua, keaktifan kader program Jumantik ditunjukkan dari upaya-upaya yang telah kader lakukan dengan aktif memberikan informasi, aktif memberikan sosialisasi seperti mengajarkan warga untuk memeriksa jentik secara mandiri, dan selalu rajin memberikan himbauan kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan masyarakat yang menilai kader Jumantik aktif dalam memberikan informasi kegiatan baik melalui grup *WhatsApp* ataupun secara langsung, aktif dalam memberikan informasi dan aktif memberikan sosialisasi serta menghimbau masyarakat mengenai pengecekan jentik.

4. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

a. Faktor Penghambat dalam Program Posyandu

Berdasarkan penyajian data diatas, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pada pelaksanaan kegiatan program

Posyandu di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara yaitu fasilitas pada program Posyandu belum memadai, kurang layak nya tempat pelaksanaan kegiatan di mana dilaksanakan di halaman masjid yang banyak dilalui kendaraan roda dua ataupun roda empat tentu dapat membahayakan para balita, selain itu belum adanya fasilitas bangku untuk menunggu antrean. Hal ini menjadi suatu kendala sehingga masyarakat merasa kurang nyaman dan kurang aman saat hadir pada kegiatan Posyandu, dengan ini dapat berpengaruh terhadap kemauan masyarakat untuk hadir dalam pelaksanaan kegiatan program.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kenyataan tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (3), di mana dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

b. Faktor Penghambat dalam Program Jumantik

Berdasarkan penyajian data diatas, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pada pelaksanaan kegiatan program Jumantik di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara yaitu kurangnya jumlah kader sebagai promotor kegiatan, melihat jumlah kader setiap RT hanya 1(satu) sedangkan tugas kader melakukan pengecekan jentik di seluruh rumah warga dalam 1(satu) RT. Dengan ini kegiatan tidak dapat dilakukan secara maksimal karena kader keteteran dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak dapat melakukan pengecekan dengan merata ke semua rumah warga, hal ini dapat menjadi salah satu faktor masyarakat tidak ikut serta pada kegiatan pengecekan jentik dengan ini kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik, dan tidak mendapatkan hasil kebermanfaatan yang maksimal.

C. Sintesis Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Program Posyandu dan Jumantik di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang masih terjadi. Dengan ini peneliti merumuskan solusi pemecahan masalah yang berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program Posyandu dan Jumantik di RW.01 dan RW.06 Kelurahan Kembangan Utara. Sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan pada program Posyandu

- a. Permasalahan pertama mengenai rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran pada program Posyandu, disebabkan masyarakat masih enggan untuk memberikan saran atau kritik apabila belum dipersilahkan oleh kader program Posyandu. Terlihat belum ada kesempatan masyarakat untuk memberikan sebuah saran atau kritik baik dalam pertanyaan secara langsung ataupun tidak.

Mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 Tahun 2003 mengenai pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, yang menjelaskan asas-asas pelayanan publik, di mana salah satu asas pelayanan publik yakni partisipasi. Dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Dengan memberikan wadah untuk masyarakat memberikan aspirasi, pendapat mereka yang tentunya akan berguna sebagai acuan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan program.

Dengan adanya permasalahan tersebut, solusi yang peneliti berikan sebagai bentuk upaya pemecahan masalah yang berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun saran kritik terhadap pelaksanaan program Posyandu. Masyarakat dapat diminta untuk memberikan pendapat, saran ataupun kritik melalui pertanyaan langsung setelah selesai diberikan pelayanan, selain itu dapat

menggunakan kotak saran ataupun melalui grup WhatsApp setiap RT. Dengan ini masyarakat dinilai bukan hanya sebagai penerima pelayanan pada suatu program, namun juga berperan untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan program. Dengan ini masyarakat berhak untuk menyampaikan keluhan maupun saran terhadap pelaksanaan program. Di mana dengan adanya wadah dan tempat untuk menyampaikan keluhan dan saran membangun dapat berguna sebagai acuan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan program selanjutnya.

- b. Permasalahan kedua mengenai fasilitas yang belum memadai pada pelaksanaan kegiatan Posyandu. Pada pelaksanaan kegiatan Posyandu terlihat bahwa fasilitas yang ada masih belum cukup memadai. Ditunjukan dari tempat pelaksanaan Posyandu yang dilakukan di halaman masjid dan tidak tersedia kursi untuk masyarakat menunggu antrean.

Mengacu dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (3), di mana dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan ini, terdapat Solusi yang peneliti berikan sebagai bentuk upaya pemecahan masalah yang berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu dengan disediakannya tempat yang layak untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu, serta disediakannya kursi tunggu untuk ibu balita yang mengantre pelayanan. Dengan solusi ini dapat membangun rasa kenyamanan, keamanan serta ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga masyarakat puas dan meningkatkan kemauan masyarakat untuk selalu hadir berpartisipasi.

2. Permasalahan pada program Jumantik

- a. Permasalahan pertama mengenai rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran pada program Jumantik, disebabkan masyarakat

masih enggan untuk memberikan saran atau kritik apabila belum dipersilahkan oleh kader program Jumantik. Terlihat belum ada kesempatan masyarakat untuk memberikan sebuah saran atau kritik baik dalam pertanyaan secara langsung ataupun tidak.

Mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 Tahun 2003 mengenai pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, yang menjelaskan asas-asas pelayanan publik, di mana salah satu asas pelayanan publik yakni partisipasi. Dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Dengan memberikan wadah untuk masyarakat memberikan aspirasi, pendapat mereka yang tentunya akan berguna sebagai acuan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan program.

Dengan adanya permasalahan tersebut, berikut Solusi yang peneliti berikan sebagai bentuk upaya pemecahan masalah yang berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun saran kritik terhadap pelaksanaan program Jumantik. Masyarakat dapat diminta untuk memberikan pendapat, saran ataupun kritik melalui pertanyaan langsung saat kader keliling melakukan pengecekan, ataupun melalui grup WhatsApp setiap RT. Dengan ini masyarakat dinilai bukan hanya sebagai penerima pelayanan pada suatu program, namun juga berperan untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan program. Dengan ini masyarakat berhak untuk menyampaikan keluhan maupun saran terhadap pelaksanaan program. Di mana dengan adanya wadah dan tempat untuk menyampaikan keluhan dan saran membangun dapat berguna sebagai acuan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan program selanjutnya.

- b. Permasalahan kedua mengenai keterlibatan masyarakat yang belum optimal pada kegiatan Program Jumantik. Di mana ditunjukan masih banyak masyarakat yang menutup pintu pada saat kegiatan pengecekan

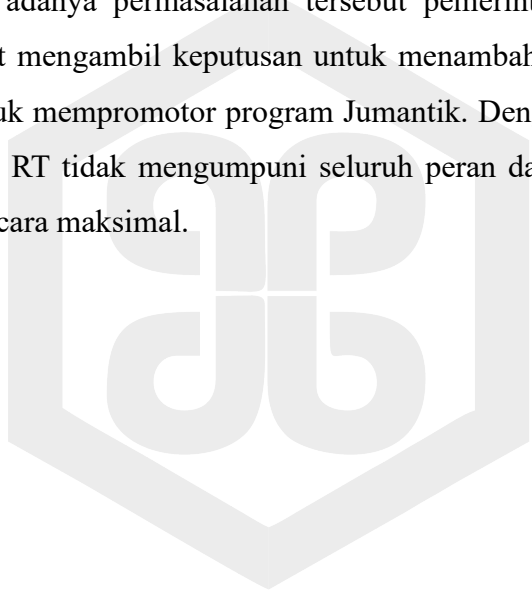
jentik oleh kader Jumantik. Masyarakat terlihat belum bersedia untuk dilakukan pengecekan jentik di rumahnya. Dengan adanya permasalahan ini tentu menjadi kendala pada pelaksanaan program, sehingga tidak dapat berjalan secara maksimal, di mana akan berpengaruh terhadap kebermanfaatan kegiatan program. Kegiatan Jumantik ini bertujuan untuk menjaga kesehatan lingkungan masyarakat, maka diperlukan ketersediaan masyarakat untuk terlibat penuh pada kegiatan program Jumantik.

Dengan adanya permasalahan tersebut, berikut solusi yang peneliti berikan sebagai bentuk upaya pemecahan masalah yang berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat:

- 1) Pemerintah kelurahan dapat bekerjasama dengan pihak Puskesmas untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya program Jumantik, kebermanfaatannya dan dampak yang terjadi apabila mengabaikan kegiatan program. Sosialisasi dapat diberikan dalam bentuk video edukasi dan dipublikasi melalui sosial media kelurahan dan dibagikan kepada setiap grup RT sehingga dapat dijangkau secara luas. Dengan sosialisasi ini menjadi bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat .
 - 2) Pemerintah kelurahan dapat melakukan peneguran serta himbauan terhadap masyarakat yang tidak mau terlibat pada kegiatan program Jumantik.
- c. Permasalahan ketiga mengenai kurangnya jumlah kader sebagai promotor program Jumantik. Melihat jumlah kader setiap RT hanya 1(satu) sedangkan tugas kader melakukan pengecekan jentik di seluruh rumah warga dalam 1(satu) RT. Dengan ini kegiatan tidak dilakukan secara maksimal karena kader keteteran dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak dapat melakukan pengecekan dengan merata ke semua rumah warga, hal ini dapat menjadi salah satu faktor masyarakat tidak

ikut serta pada kegiatan pengecekan jentik dengan ini kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik, dan tidak mendapatkan hasil kebermanfaatan yang maksimal.

Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah provinsi DKI Jakarta dapat mengambil keputusan untuk menambahkan sumber daya manusia untuk mempromotor program Jumantik. Dengan hanya 1(satu) Kader setiap RT tidak mengumpuni seluruh peran dan tugasnya dapat dilakukan secara maksimal.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A